

**ANALISIS PENERAPAN POLA BAGI HASIL PEMILIK  
KEBUN DAN PEKERJA DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
(Studi Pada Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way  
Kanan)



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh

**MAYMUNAH**  
**NPM. 1351010237**

**Jurusan: Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1439H/ 2018M**

**PENERAPAN POLA BAGI HASIL PEMILIK KEBUN DAN  
PEKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**

*(Studi Pada Kampung Bima Sakti Kecamatan  
Negeri Bsar Kabupaten Way Kanan)*

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh:



**Jurusan: Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing I : Dr. Moh Bahrudin, M. Ag**

**Pembimbing II: Vitria Susanti, M.Ec. Dev**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1439H/ 2018M**

## ABSTRAK

Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang digunakan oleh penduduk di Kampung Bima Sakti adalah sistem paroan atau bagi hasil (*musaqoh*). Bagi petani yang tidak memiliki tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan, adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan di tanggung oleh pemilik lahan. Selain itu, kebiasaan masyarakat Kampung Bima Sakti dalam melakukan sistem kerjasama bagi hasil perkebunan tidak menetapkan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqh muamalah bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Namun hal ini tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kampung Bima Sakti. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme penerapan bagi hasil penggarapan Kebun Karet terhadap kesejahteraan di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, 2) Bagaimana tinjauan Ekonomi Syari'ah terhadap bagi hasil di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan sudah memenuhi nilai keadilan dalam Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme kerjasama bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu para pelaku usaha bagi hasil di Kampung Bima Sakti dengan menggunakan metode *sampel random sampling*, sampel penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari 10 pemilik kebun dan 20 petani pekerja. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Bima Sakti dengan 2 cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani pekerja untuk dijadikan kebun karet. Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 60%-40%, 60% untuk pemilik kebun dan 40% untuk petani pekerja. Selain itu menggunakan sistem pembagian hasil sataran yang disesuaikan dengan hasil perkebunan, adapun segala biaya yang dibuthkan pada saat proses pelaksanaa di tanggung oleh petani pekerja. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang diterapkan di Kampung Bima Sakti merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam karena saling mengandung prinsip muamalah. Hasil dari kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Bima Sakti telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat antara para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan juga bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, namun belum sepenuhnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil..” (Q.S. Al-maidah:8.)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya* ( Bandung: gema risalah pers, 1989)  
hlm. 118

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan rahmat-Nya, memberikan kemudahan kepada penulis, sholawat beriringan salam selalu penulis sampaikan kepada tokoh panutan alam Nabi Muhammad SAW. Dari hati penulis yang paling dalam dan sebagai bukti hormat serta kasih sayang penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua ku Ayahanda Yadi Sugito dan Ibunda Astitin tercinta.  
Do'a tulus dan terimakasih selalu kupersembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta mendo'akan keberhasilanku, semangat yang tiada henti, motivasi, arahan, bimbingan dan inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu.
2. Kepada Kakakku Nia Kurniasih dan kakak iparku Nursalim, yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepadaku, yang memberikan moril maupun materi kepada penulis agar selalu bersemangat dalam segala hal.
3. Adikku tersayang, Ridho Dinata yang selalu menantikan keberhasilanku, yang selalu menjadi alasan penulis dalam mengejar cita-cita, adik yang selalu memberikan energi semangat, adik yang menjadi teman sejarah untuk menggapai kesuksesan bersama membahagiakan Bapak dan Ibu serta Keluarga.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidikku menjadi seseorang yang mampu berfikir untuk menjadi lebih maju. Khususnya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam tempat penulis menuntut ilmu.

5. Aan Setiawan yang selalu memberi dukungan dan menjadi penyemangat serta memberikan motivasi, selalu menemani dalam kondisi apapun hingga saat ini, semoga Allah meridhoi niat baik kita. Aamiin
6. Kepada ke-Dua ponakanku Naifah Ulya Mukhbita dan Naufal Afkar Musyaffa tercinta yang selalu membuat hari-hari penulis ceria, semoga kalian menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Aamiin
7. Kepada Guru-Guruku, dan sahabat kesayanganku Umi Mursyidah, Riskan Nur Amalia, Hayyaturridhani, Reni Mardiana, Krisna Bangkit Adi Saputra, Wahyuni Andrevia S.E yang selalu memberikan hal positif dan tak pernah berhenti memberikan semangat kepada penulis. Sehingga penulis mampu membuat skripsi ini dengan baik, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
8. Rekan-rekan seangkatan (Ekonomi Islam 2013) khususnya kelas E yang selalu memberi warna pada hari-hariku dikampus. Terimakasih untuk semua dan terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini.
9. Sahabat-sahabat barisan para pejuang syurga, Mbak Nur Ani Selaku Murobi, Mbak Delli, Mbak Silvi, Mbak Lily, Fatimah, Mbak Anggi, Mbak Yenni, Mas Ega, Ardi Yudana, Adi Setiawan, Fitri, Erna, Sasa, Reni, Jenni, agi dan semua anggota marun sward serta anggota Risma Nurul Ulum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

## **RIWAYAT HIDUP**

Maymunah lahir di kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan pada Tanggal 03 Agustus 1995 anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Yadi Sugito dan Ibu Astitin.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

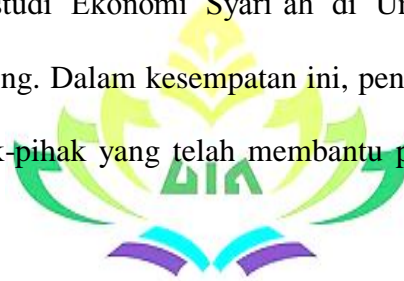
1. SDN 01 Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar 2007
2. MTS Diniyyah Putri, Kabupaten Pesawaran 2010
3. MA Diniyyah Putri, Kabupaten Pesawaran 2013
4. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kenikmatan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Polabagi Hasil Pemilik Kebun Dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan). Shalawat beriringan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman.

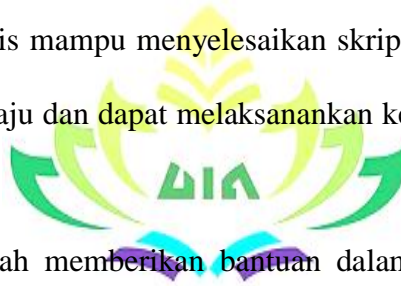
Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini antara lain:



1. Bapak Dr. Moh Bahrudin, M.A., selaku DEKAN Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran Wakil Dekan 1, 2, dan 3 yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
2. Bapak Madnasir S.E., M.S.I selaku ketua Program Studi Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya, atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dan senantiasa memotivasi dan memberikan dukungan kepada penulis.



3. Bapak Dr. Moh Bahrudin, M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Vitria Susanti, M.Ec. Dev selaku pembimbing II yang dengan sabar dan tulus ikhlas memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis skripsi ini sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
4. Bapak Suhendar selaku dosen Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) di UIN Raden Intan Lampung.
6. Perpustakaan Pusat maupun perpustakaan Fakultas yang telah menyediakan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Kepala Kampung Bima Sakti yang telah memberikan izin kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini semoga Kampung Bima Sakti semakin maju dan dapat melaksanakan kerja sama sesuai dengan syariat islam.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, semoga segala bantuannya baik moral maupun materil yang diberikan kepada penulis, akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin



Pada akhirnya penulis mempunyai keinginan mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat menjadi amal jariyyah dan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Menjadi sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu yang ada, khususnya dalam ilmu-ilmu keislaman dan ilmu ekonomi abad modern ini. Aamiin yarabbal a'lamin.

Bandar Lampung, 7 September 2018  
Penulis

**Maymunah**  
**Npm. 1351010237**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	5
D. Batasan Masalah .....	9
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Manfaat Penelitian .....	11
H. Metode penelitian .....	12
I. Populasi dan Sampel .....	14
J. Metode pengumpulan data .....	16

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Dalam Ekonomi Islam	
1. Tinjauan tentang <i>Musaqoh</i> .....	20
2. Dasar hukum bagi hasil <i>Musaqoh</i> .....	22
3. Rukun dan syarat bagi hasil <i>Musaqoh</i> .....	25
4. Hukum yang terkait dengan bagi hasil <i>Musaqoh</i> .....	27
5. Berakhirnya akad bagi hasil <i>Musaqoh</i> .....	29
6. Hikmah bagi hasil <i>Musaqoh</i> .....	30

**B. Konsep kesejahteraan**

1. Pengertian kesejahteraan .....	32
2. Pengertian kesejahteraan masyarakat .....	33
3. Indikator kesejahteraan masyarakat .....	36
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan .....	40
5. Konsep kesejahteraan ( <i>falah</i> ) masyarakat dalam Ekonomi Islam .....	43
6. Landasan hukum kerjasama bagi hasil di Indonesia.....	45

**BAB III PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Gambaran Umum Kampung Bima Sakti.....	60
2. Kondisi Masyarakat Kampung Bima Sakti .....	62
3. Susunan Pemerintahan Kampung Bima Sakti .....	67
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Bima Sakti .....	68

**B. Gambaran Umum Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil**

1. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil di Kampung Bima Sakti.....	72
2. Hasil Interview Pelaksanaan Bagi Hasil di Kampung Bima Sakti .....	74
3. Sistem Kerjasama Bagi Hasil di Kampung Bima Sakti .....	82
4. Permasalahan Pelaksanaan Bagi Hasil di Kampung Bima Sakti .....	86
5. Manfaat dari Kerjasama Bagi Hasil di Kampung Bima Sakti.....	87

**BAB IV ANALISA DATA**

A. Mekanisme bagi hasil .....	89
B. Pelaksanaan bagi hasil Masyarakat Kampung Bima Sakti .....	98

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	107

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan intisari dari sebuah skripsi oleh karena itu sebelum penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan skripsi ini maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul mengenai **“Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Karet Kampung Bima Sakti Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan)”** Adapun istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau perbuatan untuk mendapatkan faktor yang tepat atau penguraian pokok permasalahan atas bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.<sup>2</sup>

#### 2. Bagi Hasil (*Musaqoh*)

Bagi hasil adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Ahmad Iflah Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 621.

<sup>3</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah untuk Mahasiswa, UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.213

### 3. Pekerja

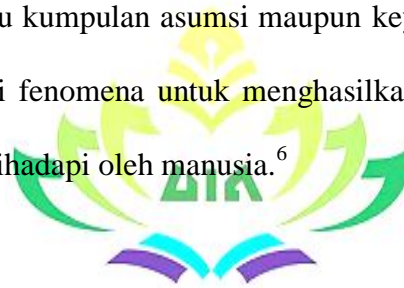
Pekerja adalah orang yang bekerja; orang yang menerima upah atas hasil kerjanya; buruh; karyawan.<sup>4</sup>

### 4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang terorganisir yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standar norma-norma masyarakat sebagai tujuan cita-cita, pedoman, dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual.<sup>5</sup>

### 5. Perspektif

Perspektif adalah suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tertentu tentang bagaimana memahami fenomena untuk menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi yang dihadapi oleh manusia.<sup>6</sup>



### 6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan

---

<sup>4</sup> Sri Suketi Adiwimarta, hlm 488.

<sup>5</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Penmbangunan Kesejahteraan Sosial*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 128

<sup>6</sup> LIPI, *Probelem Komunikasi Antara Aparat Polri Dan Pengunjuk Rasa*, Majalah KOMUNIKA, vol.10 no.2 2007, hlm 95

sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat .<sup>7</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan Perspektif Ekonomi Islam adalah sudut pandang atau tinjauan aturan-aturan fundamental Ekonomi yang dibangun dengan dasar-dasar dan siasat Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sekarang dan kapanpun.

Berdasarkan uraian kata demi kata di atas dapat dipahami makna judul tersebut yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil antara dua pihak untuk bekerjasama saling berkaitan antara satu dan yang lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati bersama-sama yang tertuang dalam akad perjanjian yang telah disepakati pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama.

Karena itu akad tersebut merupakan akad perjanjian untuk bekerjasama dalam pola bagi hasil pemilik kebun dan pekerja, hal ini diwujudkan dalam penerapan pola bagi hasil pemilik kebun dan pekerja ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonosia, Sleman Yogyakarta, 2004, hlm. 5

## 1. Alasan Objektif

- a. Pertanian merupakan tumpuhan perekonomian masyarakat Kampung yang menghasilkan. Oleh karena itu perlu adanya penelitian untuk melihat sistem bagi hasil yang berlaku didalam masyarakat yang melakukan kerjasama. Masyarakat Kampung Bima Sakti mayoritas bekerja di sektor pertanian. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan sendiri maka mereka melakukan kerjasama yang di sebut parohan oleh masyarakat setempat. Keadaan perekonomian masyarakat Kampung Bima Sakti masih tergolong belum sejahtera, hal ini dikarenakan minimnya pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat ekonomi Islam, dari segi pembagian dan dampak dari kerjasama tersebut, dan adanya tindakan yang tidak jujur dari pihak pekerja terhadap pemilik kebun. Sehingga penting untuk menganalisis pola bagi hasil yang berlaku.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Penulis tertarik untuk membahas judul skripsi ini, karena ditempat penelitian ini banyak masyarakat yang melakukan praktik pola bagi hasil, tentunya hal ini berdampak langsung pada perekonomian masyarakat itu sendiri khususnya perekonomian para pelaku dkerjasama bagi hasil, karenanya sangat relevan untuk meneliti praktik pola bagi hasil yang saat ini banyak dilakukan masyarakat terutama di Kampung Bima Sakti.



- b. Karena Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan adanya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Way Kanan merupakan daerah agraris, dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Berdasarkan jenis usaha tani yang dikembangkan meliputi budidaya tanaman pangan dan holikultural, budidaya peternakan dan budidaya perikanan. Adapun lahan di Kabupaten Way Kanan sangat luas, yang dapat dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah merupakan jenis lahan yang digunakan sebagai areal persawahan, lahan kering merupakan lahan yang digunakan untuk perkebunan. Potensi perkebunan di Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan, areal perkebunan Kabupaten Way Kanan mencakup areal seluas 145.989,30 Ha dengan jumlah produksi hasil perkebunan 245.380,60 Ton/Th.<sup>8</sup>

Kampung Bima Sakti merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Negeri Besar yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Pada umumnya, masyarakat Kampung Bima Sakti memiliki lahan pertanian atau perkebunan yang luas, maka mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut.

---

<sup>8</sup>Diakses dari, Badan Pusat Statistik *luas lahan areal Kabupaten Way Kanan* tahun 2017, (pada Tanggal 12 Agustus 2018, pukul 20.00)

Sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk. Bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan yang dalam hal ini perkebunan. Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang digunakan oleh penduduk di Kampung Bima Sakti adalah sistem paroan atau pola bagi hasil.

Pelaksanaan paroan kebun yang terjadi di Kampung Bima Sakti berlangsung sejak lama, bahkan pola kerja sama ini sudah menjadi tradisi disebabkan luasnya lahan perkebunan dan adanya sebagian masyarakat pemilik kebun yang tidak sanggup mengelola kebunnya. Dimana pemilik pihak kebun meminta petani untuk mengurus atau menggarap kebun mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik kebun supaya kebunnya untuk bisa digarap oleh petani tersebut, selain itu, pemilik kebun telah menyediakan kebun yang sudah terdapat tanaman karet. Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan perkebunan ditanggung oleh pemilik kebun, sedangkan petani pekerja hanya membawa pisau sadap saja.

Pembagian hasil dari paroan yaitu, ada yang melakukan setengah, sepertiga, seperenam, terletak pada kesepakatan awal. Pembagian setengah apabila pembelian pupuk dan perawatan kebun di tanggung bersama oleh kedua belah pihak. Pembagian sepertiga apabila pembelian pupuk dan perawatan ditanggung oleh pemilik kebun. Kerja sama yang banyak dilakukan di Kampung Bima Sakti kecamatan Negeri Besar adalah pembagiannya dilihat dari harga karet yang sering berubah-ubah apabila harga karet di atas sepuluh ribu rupiah maka persentase

yang digunakan adalah setengah yakni pembelian pupuk dan perawatan kebun dilakukan bersama-sama. Apabila harga karet di bawah sepuluh ribu kebanyakan petani dan pekerja menggunakan persentase seperenam yakin pembelian pupuk dan perawatan kebun ditanggung oleh pemilik kebun. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak ditentukan kapan berakhirnya pola kerja sama.<sup>9</sup>

Dilihat dari kebiasaan sebagian masyarakat Kampung Bima Sakti melakukan pola bagi hasil dalam sistem pertanian terdapat ketidakadilan, dimana terkadang ada diantaranya pekerja yang tidak jujur sehingga pekerja mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada pemilik kebun, seperti halnya merugikan pemilik kebun. Selain itu kebiasaan masyarakat Kampung Bima Sakti dalam melakukan pola bagi hasil perkebunan tidak menetapkan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqh muamalat bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktu nya dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Namun, Hal itu tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kampung Bima Sakti akan kerjasama perkebunan tersebut.

Al-Ghazali menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan di dunia ini dan di akhirat (*maslahat ad-diin wa ad-dunya*) merupakan tujuan utamanya”. Sebagaimana diakui dalam islam, keinginan masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi yaitu memberi hak-hak yang pasti kepada masyarakat dan

---

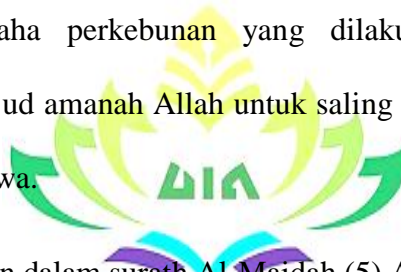
<sup>9</sup>Wawancara dengan Yadi Sugito, pemilik Kebun Karet, Tanggal 29 Desember 2017

menyediakan sebagai tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan sosial bersama dengan menghapus kemiskinan.<sup>10</sup>

Menurut Amir Syariffudin, *musaqah* diartikan dengan kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.<sup>11</sup> Tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya . perawatan disini mencakup mengairi (ini adalah yang sebenarnya arti *musaqah*).

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kerja sama yang berlangsung di Kampung Bima Sakti yaitu *musaqah* yang pada hakikatnya ialah kerja sama antara pemilik kebun dengan petani pekerja pertanian dengan bagi hasil menurut kesepakatan bersama.

Kerjasama dalam usaha perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat hakikatnya merupakan wujud amanah Allah untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan Takwa.



Allah SWT menjelaskan dalam surath Al-Maidah (5) Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

---

<sup>10</sup>Gunawan Sumodinigrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hlm.7

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, jakarta, 2003, hlm.243

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>12</sup>(Q. S. Al-Maidah : 2)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan pola bagi hasil, baik dari segi Ekonomi Syari’ah, nisbah dan larangan-larangannya, dan untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. untuk itu penulis akan membahas hal tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul **Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik dan Pekerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam** (Studi Pada Petani Karet Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan).



#### **D. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dapat dilaksanakan secara fokus, tidak menyimpang dan mengembang dari tujuan semula yang direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Q.S Al-Maidah (5) : 2

1. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan pola kerja sama perkebunan karet antara pemilik kebun dan pekerja di Kampung Bima Sakti
2. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun dan pekerja perkebunan karet atau pelaku pola bagi hasil yang saat ini berjumlah 150 orang.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan yang hendak di capai, maka perlu adanya perumusan masalah yang jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penerapan bagi hasil penggarapan Kebun Karet di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana kesejahteraan masyarakat Bima Sakti setelah adanya kerjasama bagi hasil?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap bagi hasil di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan sudah memenuhi nilai keadilan dalam Ekonomi Islam?

#### **F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk dapat menjelaskan dan menilai mekanisme bagi hasil penggarap karet di Kampung Bima Sakti kecamatan negeri besar kabupaten way kanan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan masyarakat setelah adanya kerjasama bagi hasil.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap bagi hasil di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan sudah memenuhi nilai keadilan dalam ekonomi Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi khazanah ilmu ekonomi Islam serta dapat dijadikan pengalaman dan wadah pelatihan dalam teori-teori serta aplikasi konsep-konsep ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.

### b. Manfaat praktis

#### 1) Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai sistem kerjasama *musaqoh* perkebunan karet. Serta membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi.

#### 2) Pelaku Usaha (pemilik kebun dan petani pekerja )

- a) Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem kerjasama yang dipraktikkan, sehingga dapat mengemabangkan sistem kerjasama yang sesuai dengan konsep syar'iah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.



- b) Dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari praktik kerjasama *musaqoh* terhadap kesejahteraan masyarakat petani perkebunan karet.
- 3) Bagi pembaca

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap kerjasama *musaqoh* yang diterapkan Masyarakat Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian kasus dan Penelitian lapangan (*Case study and field research*) Penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>13</sup> Di sini penulis terjun langsung ke lapangan untuk meneliti Bagi Hasil antara pemilik kebun dan pekerja sadap karet di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

#### **b. Riset Kepustakaan**

Riset kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko, Op. Cit., hlm. 46



ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen, dan lain-lain.<sup>14</sup>

c. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang berperilaku yang diamati.<sup>15</sup> Dalam kaitan penelitian ini, penulis terjun langsung guna mendapatkan data-data baik berupa tulisan, dokumen ataupun data yang berupa lisan dengan cara merinci kalimat-kalimat yang diperoleh dari pada responden.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>16</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dari responden baik berupa tanggapan maupun pernyataan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu data primer bersifat lebih terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar

---

<sup>14</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 32

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Reneka Cipta, Yogyakarta, 1993. Hlm. 56

<sup>16</sup> Moh Pabundu Tika, *metodologi riset bisnis*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm. 57

Kabupaten Way Kanan yang berkenaan dengan penerapan bagi hasilnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun pihak lainnya.<sup>17</sup>

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>18</sup>. Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh pelaku bagi hasil di Kampung Bima Sakti Kec. Negeri Besar Kab.Way Kanan. yaitu pemilik kebun dan pekerja.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Populasi Penelitian**

No	Petani	Jumlah pelaku kerja sama
1	Petani pemilik kebun	50
2	Petani pekerja kebun	100

---

<sup>17</sup> Moh. Pabundu Tika, Op. Cit, hlm. 58

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, penerbit Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 117

D	Jumlah	150 orang
---	--------	-----------

Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Kampung Bima Sakti

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>19</sup> Pengambilan sampel menggunakan metode random sampling yaitu dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Dan sebagai pemikiran apabila subjeknya kurang dari 100 maka dapat diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar maka dapat diambil 10-15 % atau 20-25%.<sup>20</sup> Berdasarkan hal tersebut, sampel dalam penelitian ditentukan sebesar 20% dari total populasi.

Jika dijabarkan petani pemilik kebun berjumlah 50 orang dan petani pekerja berjumlah 100 orang, penulis mengambil sampel sebesar 20% dari total populasi. Dapat disimpulkan bahwa petani pemilik kebun berjumlah 10 orang dan petani pekerja berjumlah 20 orang. Jadi jumlah sampel yang akan di gunakan oleh peneliti berjumlah 30 orang.

**Tabel 1.2**

<sup>19</sup> Sugiono, Op. Cit, hlm. 118

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu praktek*, PT. Asli Mahasatya, Jakarta, 2006, hlm. 134

### Jumlah Sampel Penelitian

No	Petani	Jumlah Pelaku Bagi Hasil
1	Petani pemilik kebun	10
2	Petani penggarap kebun	20
	<b>Jumlah</b>	30 orang

Sumber: Data diolah pada tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang pelaku usaha.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang dieperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

##### a. Interview (wawancara)

Metode interview adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>21</sup> Interview dilakukan langsung dengan informan, yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang dihadapi pekerja. Informasi itu terdiri dari pemilik kebun dan pekerja. Agar wawancara dapat lebih terarah, pelaksanaannya dilakukan dengan pedoman wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan. Interview ini di tunjukkan kepada pemilik kebun dan

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 83

pekerja. Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kebun dan pekerja.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>22</sup> Di samping itu, observasi juga dimaksudkan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada, sejauh yang dapat dilihat serta untuk melihat langsung kenyataan yang tidak bisa di angkat melalui wawancara.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah setiap bahan bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.<sup>23</sup> Dokumentasi di sini dimaksudkan untuk menghimpun data yang berupa dokumen tentang masyarakat sekitarnya. Selain itu, metode dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah yang terjadi di daerah penelitian baik yang berbentuk tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan

---

<sup>22</sup> Cholid Narbuto, Op. Cit., hlm. 70

<sup>23</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 216

dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Analisis kualitatif dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Hal ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari pemilik kebun dan pekerja di Kampung Bima Sakti Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan yang berkaitan dengan bagi hasil menurut perspektif Ekonomi Islam sehingga mendapatkan keadaan dan praktik yang berlangsung dalam pembagian hasil tersebut kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam menganalisa penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa yang umum tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 dan 2, Andi Offset, Yogyakarta, 1985, hlm.2

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Dalam Ekonomi Islam

Kerjasama secara umum adalah sesuatu bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.

Kerjasama ini banyak macamnya, seperti kerjasama dalam usaha perdagangan dan industri, kerjasama syirkah, kerjasama dalam usaha perkebunan dan lain sebagainya.

Kerjasama dalam pertanian dapat berlaku antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja tani yang dikenal dengan istilah *Muzara'ah/ Mukhabarah*, atau antara pemilik pepohonan dengan pekerja perawat pepohonan tersebut yang dikenal dengan istilah *Musaqoh*.



#### 1. Tinjauan tentang *Musaqoh*

##### a. Pengertian *Musaqoh*

Secara sederhana *Musaqoh* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.<sup>25</sup> Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan

---

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 243

buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqoh*) menyangi, merawat dan usaha lain yang berkenan dengan buahnya.<sup>26</sup>

*Musaqoh* diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>27</sup>

*Musaqoh* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>28</sup>

Secara etimologi, *al-musaqoh* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologis fiqh, *al-musqoh* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan :

*“penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwab petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”.*

Menurut malikiyah sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 145

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktis*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 100

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 146



- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.

Menurut ulama Hanabilah, *musaqoh* mencakup dua masalah berikut ini:<sup>30</sup>

- a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti atau setengahnya.
- b. Seseorang menyerahkan tanah atau pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanaminya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.

Dengan demikian akad *al-musaqoh* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani pekerja dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 147

yang dihasilkan pihak kedua berupa getah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan petani pekerja sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

#### **b. Dasar Hukum Bagi Hasil *Musaqoh***

Dasar hukum *musaqoh* yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya adalah:

Q.S Al-Maidah (5) : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلْبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :“..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.(Q. S. Al-Maidah : 2)

Dalam ayat tersebut Allah-SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan , perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Jilid III*, Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1995, hlm.382

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....”<sup>32</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

<sup>32</sup> Q.S al-baqarah (2): 282

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28) : 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا  
نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

Artinya : “Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi).”<sup>33</sup>

Selain ayat diatas, asas hukum *musaqoh* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr.r.a., bahwa Rasulullah SAW.

Bersabda yang artinya:

Artinya : “ Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqoh* dari segi syara' terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail berpendirian bahwa akad *al-musaqoh* dengan ketentuan petani pekerja mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *al-musaqoh* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk kedalam larangan Rasul saw. Dalam sabda yang berbunyi:

“Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaknya ia jadikan dan oleh sebagaitanah pertanian dsan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan itu dengan imbalan sejumlah makan tertentu. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Rafi' ibn Khudajj)

---

<sup>33</sup> Q.S al-Qashash (28):28

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, kedua tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad *al-musaqoh* dibolehkan. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengelolah sendiri perkebunannya.<sup>34</sup>

### c. Rukun dan Syarat Bagi Hasil *Musaqoh*

Kerjasama dalam bentuk *musaqoh* ini berbeda dengan menupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musaqoh*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qobul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.<sup>35</sup>

Sedangkan rukun-rukun *musaqoh* menurut ulama syafi'iyah ada lima berikut ini:

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 283.

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Op., Cit*, Hlm. 283

- a. Shighat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharkh*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakal dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Hendi Suhendi, *Op,Cit.*, hlm. 148-149

**d. Hukum-hukum yang terkait dengan bagi hasil *al-musaqoh***

Akad *al-musaqoh*, menurut ulama fiqh adakalanya *sahih*, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad *al-musaqoh* tidak terpenuhi.

Adapun hukum-hukum yang terkait dengan akad *al-musaqoh* yang shahih adalah:

- a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani pekerja.
- a. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani)
- b. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- c. Akad *al-musaqoh* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada petani itu.
- d. Petani pekerja tidak boleh melakukan akad *al-musaqoh* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pihak perkebunan (pihak pertama).

Akad *musaqoh* bisa fasid apabila:

- a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu.
- b. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna *al-musaqoh* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- c. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani pekerja saja.
- d. Disyaratkan bahwa mencakul tanah menjadi kewajiban petani pekerja, karena dalam akad *al-musaqoh* pekerjaan sejenis itu bukan menjadi pekerjaan petani.
- e. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- f. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman belum boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.<sup>37</sup>

Jika akad *al-musaqoh* fasid, maka akibat hukumnya:

- a. Jika penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja di kebun ini.
- b. Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil

---

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Op, Cit.* Hlm. 286-287



kebun itu, ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku didaerah itu (*ajru al-mitsil*).<sup>38</sup>

**e. Berakhirnya Akad Bagi Hasil *Musaqoh***

Menurut ulama fiqh<sup>39</sup>, akad *musaqoh* berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis
- b. Salah satu pihak meninggal dunia
- c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani pekerja itu terkenal sebagai seorang pencuru hasil tanaman dan petani pekerja sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.<sup>40</sup>

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqoh* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada unsur dari pihak petani.<sup>41</sup>

Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad *musaqoh* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka

---

<sup>38</sup> *Ibid*,

<sup>39</sup> *Ibid*,

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 287-288.

<sup>41</sup> *Ibid*

harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.<sup>42</sup>

Menurut Ulama Hanabilah, akad *musaqoh* sama dengan akad *al-muzara'ah* yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik kebun dan petani pekerja, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

#### **f. Hikmah *Musaqoh***

Istilah mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, syari'at membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbandungnya kesulitan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, Bandung*, PT. Al-Ma'arif, hlm. 37

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>44</sup>

Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong.

Dalam hadits Nabi, Rasulullah bersabda:

*Annas ra. Berkata bahwa rasulullah SAW, bersabda “seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman, lalu sebagian hasilnya dimakan burung, manusia, atau binatang, maka orang yang menanam itu mendapatkan pahala”.*

Hadits tersebut menunjukkan bukti-bukti konkrit bahwa syari’at Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari’at tidak akan pernah didapati suatu tuntunan yang melewati batas kemampuan hambannya. Dalil-dalil tersebut juga mengidentifikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-hukumnya (yang termuat dalam syari’at Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahandan keringanan pada hambanya.

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Op., Cit*, hlm. 244

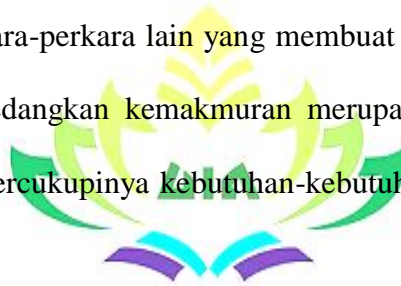
## **B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum**

### **1. Pengertian kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.<sup>45</sup>

Sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aman, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaaan dan sebagainya.<sup>46</sup>

Kemampuan merupakan suatu keadaan terjaminnya jiwa maupun raga seseorang baik individu maupun golongan. Adapun keselamatan merupakan keadaan meliputi terlindungi dari masalah fisik, sosial, keuangan, politik perasaan, pekerjaan, psikologi, perkara-perkara lain yang membuat kerusakan dan kejadian yang tidak diinginkan. Sedangkan kemakmuran merupakan keadaan seseorang ketika terpenuhinya atau tercukupinya kebutuhan-kebutuhan seseorang baik lahir maupun batin.



Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang

---

<sup>45</sup> Astriana Widyaastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Kerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009", Economics Development Analysis Journal, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, UNS, Indonesia, 2012

<sup>46</sup> W.J.S. *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 126.

lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinanyang mengancam.<sup>47</sup>

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta yaitu catera yang berarti payung. Artinya adalah yaitu orang yang sejahtera adalah orang ynag dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.<sup>48</sup> Menurut undang-undang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniyah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.<sup>49</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syari'ah. Pandangan ini dalam konsep ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.<sup>50</sup>

## **2. Pengertian kesejahteraan masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari standar kehidupan

---

<sup>47</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Multi Pressindo, Jakarta, 2008, hlm, 166.

<sup>48</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 8.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (13)

<sup>50</sup> M Umar Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Alih Bahasa Ihwan Abidin Basri, Sistem Moneter Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 2-3

masyarakat.<sup>51</sup> Standar kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang telah ditentukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Kesejahteraan sosial menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 : “ kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya.<sup>52</sup>

Adapun pengertian kesejahteraan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Arthur Dunham

Kesejahteraan sosial dapat diidentifikasi sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Rudy Bahrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPPSTM YKPN, Yogyakarta, 2012, hlm.145.

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat

<sup>53</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm, 28.

b. Walter A. Frierlander

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.<sup>54</sup>

c. Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>55</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan pemerintah maupun

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>55</sup> Universitas Sumatra Utara, “ *Kesejahteraan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*” Tersedia di <http://repository.USU.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2018

kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat.

### **3. Indikator kesejahteraan masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi soaila dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu, Beeman membedakan indikator kesejahteraan masyarakat dalam tiga kelompok, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tiga kesejahteraan masyarakat di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Coli Clsark, Gilbert dan Kanvis
- b. Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga setiap negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi minyak yang dipelopori Bennet.

---

<sup>56</sup> Rudy Badrudin, *Op, Cit.*, hlm. 147-148



Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (pasang usia subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.<sup>57</sup>

Dari beberapa definisi indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:<sup>58</sup>

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi (>Rp.5000.000)
- 2) Sedang (1.000.000-Rp.5.000.000)
- 3) Rendah (<Rp. 1.000.000)

b. Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya

---

<sup>57</sup> Sub Direktorat Analisis Statistik, *Analisis Dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2008, hlm. 4.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 17-18

proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengidentifikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk non makanan  $>80\%$  dari pendapatan.

#### c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut materi pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

#### d. Perumahan

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantainya  $10\text{m}^2$  dan bagian terluas dari rumah bukan tanah. Status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

#### e. Kesehatan

Kesehatan adalah kesejahteraan dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antara negara adalah Human development index (HDI) atau index pembangunan manusia (IPM), index tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita).<sup>59</sup> Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi:

- 1) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein yaitu 2100 kkal/hari.
- 2) Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.

---

<sup>59</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Index Pembangunan Kesehatan Manusia*, hlm. 13

- 3) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan dirumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

#### **4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan**

##### **a. Faktor intern keluarga**

##### **1) Jumlah anggota keluarga**

Pada zaman sekarang ini tuntutan semakin meningkat tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan sarana pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi, dan lingkungan yang serasi.

##### **2) Tempat tinggal**

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan menggembirakan serta menyejukan hati. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang menimbulkan kebosanan untuk menempati.

##### **3) Keadaan sosial ekonomi keluarga**

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis , bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari kebutuhan hati dan rasa sayang antara anggota keluarga. Manifestasi daripada hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat, menghormati, toleransi, bantu-membantu dan saling mempercayai.

#### 4) Keadaan ekonomi keluarga

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga jadi semakin banyak sumber-sumber keuangan/pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga.

#### b. Faktor ekstern

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu dihindarkan, karena hal ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan ketentraman batin anggota keluarga yang datangnya dari luar lingkungan keluarga antara lain:

- 1) Faktor manusia yaitu, iri hati, fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma.
- 2) Faktor alam bahaya alam, kerusakan dan berbagai macam virus penyakit
- 3) Faktor ekonomi negara pendapatan tiap penduduk atau income perkapita rendah, inflasi
- 4) Faktor nilai hidup, yaitu suatu yang dianggap paling penting dalam hidupnya.
- 5) Nilai hidup merupakan “konsepsi”, artinya gambaran mental yang membedakan individu atau kelompok dalam rangka mencapai sesuatu yang diinginkan.
- 6) Faktor tujuan hidup yaitu sesuatu yang akan dicapai atau sesuatu yang diperjuangkan agar nilai yang merupakan patokan dapat tercapai dengan demikian tujuan hidup tidak terlepas dari nilai hidup.

- 7) Faktor standar hidup yaitu tingkatan hidup yang merupakan suatu patokan yang ingin dicapai dalam memenuhi kebutuhan.<sup>60</sup>

Hasil survei biaya hidup (HSB) tahun 1989 yang dilakukan oleh BPS membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan daripada untuk bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pola bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kesejahteraan antara lain:

- 1) Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat
- 2) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat
- 3) Potensi regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi dan
- 4) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.<sup>61</sup>

c. Kesejahteraan (*falah*) masyarakat dalam Ekonomi Islam

---

<sup>60</sup> Elkana Goro Leb, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL, Universitas Nusa Cendana, 2013

<sup>61</sup> Arifin Taslim, *Metode Kesejahteraan Masyarakat*, IPB, Bogor, 2004, hlm. 33.

## 1. Konsep Kesejahteraan (falah) Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Dalam konsep Islam, terdapat satu titik awal yang harus kita perhatikan, yaitu ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada aqidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Syariat tersebut merupakan hukum atau ketetapan-ketetapan Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Menurut M. Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu merealisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas pada koridor yang mengacu pada ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut Muhammad bin Abdullah Arabi, ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.<sup>63</sup> Adapun menurut Abdul manan, ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>64</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, maka ekonomi Islam merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu masyarakat dengan berlandaskan pada hukum-hukum syariat Islam yaitu:

---

<sup>62</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 10.

<sup>63</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 10

<sup>64</sup> *Ibid.*,

- a. Al-Qur'an, merupakan wahyu kalam Allah SWT yang diturunkan dalam rangka menuntut kehidupan di dunia.
- b. As-Sunah, merupakan perilaku Nabi Muhammad Saw, yang dijadikan teladan oleh umatnya.
- c. Ijma', merupakan para imam Mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa Rasulullah Saw sebelum wafat, terhadap hukum-hukum syara' tentang suatu masalah.
- d. Qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan hal lain yang sudah ada ketentuan hukum karena adanya persamaan penyebab.

Al-falah diambil dari kata dasar falah yang bermakna zhafara bima yurid (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *aflah* yang artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut Prof. Dr Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, secara istilah falah berarti kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi (komprehensif) dan seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang terlihat di Al-Qur'an dan sunnah.<sup>66</sup>

Dari pengertian diatas falah bisa diartikan sebagai kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir dan batin, yang mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

<sup>65</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir, Pustaka Progresif*, Surabaya, 1997, hlm. 1534

<sup>66</sup> Syaikh Muhammad Muhyiddin Qadaghi, *Al Falah Fi Al Kitab Wa As Sunah*, Tersedia di <http://Qaradaghi.Com.Com>, Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2018



Imam Al-Ghazali menenrangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dnegan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Kebutuhan primer (dhoruriyah) seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal
- b. Kebutuhan sekunder ( tahsiiniyah) yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital, tetapi dubutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup.
- c. Kebutuhan tersier (tahsiiniyah) mencakup kegiatan dalam hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.

Islam menekankan bahwa manusia adalah mahluk hidup sosial, dan karena itu dia dapat mengembangkan kepribadian hanya dalam masyarakat. Sholat lima waktu dalam sehari dalam islam adalah wajib dalam jamaah, demikian pula ziarah ke mekah wajib bagi yang mampu. Orang Islam diperintahkan sholat lima kali sehari tetapi juga diperintahkan melaksanakan perdagangan (usaha) mereka dan berdagang setelah shalat.<sup>68</sup>

Kesejahteraan masyarakat yang didambakan dalam Al-Qur'an tercermin dari surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, surga diharapkan menjdai arah

---

<sup>67</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga Raja Grafindo*, Jakarta, 2010, hlm.

62

<sup>68</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, PT Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta, 1995, hlm. 52

pengabdian Adam dan Hawa sehingga bayang-bayang surga ini diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya di akhirat secara hakiki, masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah kepada Adam.<sup>69</sup>

Dalam Al-Qur'an surath Thaha ayat 117-119

فَقُلْنَا يَتَّادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى  
﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Artinya : "Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".<sup>70</sup>

Dari pemaparan ayat di atas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan untuk utama kesejahteraan sosial. Inilah rumusan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an. Rumusan ini dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial yang pada kenyataannya dapat menyempit dan meluas sesuai dengan kondisi pribadi, masyarakat serta perkembangan zaman. Untuk masa kini, kita dapat berkata bahwa yang sejahtera adalah yang terhindar dari rasa takut

<sup>69</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu' Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung, Nizan, 1996, hlm. 127.

<sup>70</sup> QS. Thaha (20) : 117-119.

terhadap penindasan, kelaparan, penyakit, kebodohan, serta masa depan diri dan keluarga bahkan lingkungan.<sup>71</sup>

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:<sup>72</sup>

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensin pada kebenaran. Sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ”.<sup>73</sup>

- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok ketentuan saja.

<sup>71</sup> M Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 128

<sup>72</sup> Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 63

<sup>73</sup> Q.S Al-Maidah (5): 8

c. *Takaful*, (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempuh hubungan horizontal ini secara seimbang.<sup>74</sup>

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencakupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer (daruri) sekunder (the need/haji), maupun tersier (the commendable/tahsin) dan pelengkap (the luxury/kamili) disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencakup keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan Islam sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.<sup>75</sup>

## 2. Indikator kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi Islam

Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh maslahat dan kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupan. Hal ini, merupakan dasar dan tujuan dari Islam itu sendiri, yaitu maslahat al-‘ibad (kesejahteraan hakiki bagi manusia), dan sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan *falah* (keberuntungan) yang maksimum. Pemenuhan kebutuhan yang diperbolehkan Islam berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani.

---

<sup>74</sup> Munrokhim Misanam Dkk. *Teks Book Ekonomi Islam*, P3EI, Jakarta, 2007, hlm. 39 Dalam Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Op.Cit.*, hlm.63

<sup>75</sup> Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Op.Cit.*, hlm. 89.

Dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik (sejahtera) terdiri dari dua unsur yaitu saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yaitu:<sup>76</sup>

a. Unsur materi

Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan keadaan manusia dalam menikmati apa yang telah Allah berikan dimuka bumi ini berupa perhiasaan dan hal-hal yang baik (*thayyiban*). Al-qur'an dan Sunnah nabawiyyah telah menerangkan hal-hal yang baik dalm unsur materi yakni:

1) Makanan dan minuman

Makanan dan minuman yang baik-baik lagi lezat dan wangi seperti daging, buah-buahan, susu, madu, air tawar yang mengalir, dan menyegarkan.

2) Pakaian dan perhiasaan

Allah memberikan nikmat kepada hamba-Nya dengan menjadikan mereka buat pakaian dan perhiasaan. Tujuan utama pakaian adalah menutup aurat. Perhiasaan adalah sesuatu yang dipakai berhias secara lahir. Pakaian termasuk dharuriat (kebutuhan yang tidak boleh tidak harus terpenuhi), sedangkan perhiasan sebagai penambah dan pelengkap.

3) Tempat tinggal

Tempat tinggal yang baik adalah nikmat yang Allah berikan, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 80:

---

<sup>76</sup> Yusuf Qhardawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Rabbani Pers, Jakarta, 2001, hlm. 66.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ  
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا  
وَأَشْعَارُهَا أَثْنَا وَمِثْلًا إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal.” ....<sup>77</sup>

#### 4) Kendaraan

Allah berfirman tentang kendaraan yang baik dari jenis hewan maupun kendaraan biasa dalam surat an-Nahl ayat 8:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”<sup>78</sup>

#### 5) Kehidupan suami istri

Tentang kehidupan suami istri dan keluarga. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik....”<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Q.S Al-A'raaf (7): 26

<sup>78</sup> Q.S an-Nahl (16) : 80

#### 6) Permainan (hiburan)

Islam membolehkan permainan yang baik seperti mendengar nyanyian yang baik lagu yang menyenangkan, bermain dengan kuda dan olahraga, bermain yang menyegarkan atau menontonnya, guyonan yang bukan dusta dan hal-hal lainnya yang menyebabkan keindahan hidup, dan kesenangan batin. Permainan yang bersih dan baik adalah salah satu kebutuhan dari kebutuhan-kebutuhan pribadi dan masyarakat, tetapi tidak boleh berlebihan dan melenceng jauh dari nilai dan akhlak, dan menjadi alat yang merusak hati dan pikiran, maka hal itu diharamkan dan dilarang.

#### 7) Zuhud (kesederhanaan) yang dianjurkan Islam

Zuhud adalah kemampuan mengatasi syahwat kehidupan dan gemerlapnya dunia dan mendahulukan akhirat daripada dunia, jika keduanya bertentangan.<sup>80</sup>



#### b. Unsur spiritual

Kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya semata-mata mengandalkan kehidupan material saja. Bisa jadi seseorang telah memiliki dengan cukup makanan yang enak, minuman yang menyegarkan, pakaian yang megah, kendaraan yang mewah, rumah yang luas dan istri yang cantik. Walaupun demikian, ia belum tentu berhasil mencapai kehidupan yang baik atau sejahtera. Sesungguhnya landasan kehidupan yang baik atau sejahtera adalah:

---

<sup>79</sup> Q.S an-Nahl (16) : 72

<sup>80</sup> Yusuf Qardhawi, *Op, Cit.*, hlm. 67-76

- 1) Ketenangan jiwa
- 2) Kelapangan dada
- 3) Ketentraman hati

Apabila seseorang mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu bukanlah terletak pada mengumpulkan dunia. Bukan terletak pada pemikiran harta yang bertumpuk dari emas dan perak. Betapa banyak orang yang memiliki tumpukan harta karun, tetapi itu terhalang daripadanya, disiksa dengannya, pahala harta itu digenggamnya.

Pada zaman sekarang, kita melihat betapa banyak milyuner yang selama hidupnya terhalang dari kenikmatan yang dengan mudah didapatkan oleh fakir dan miskin. Mereka ditimpa penyakit diabetes, darah tinggi, lemah jantung atau yang lainnya yang kini banyak tersebar dikalangan orang-orang kaya.

Semua itu memperkuat kenyataan bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan terletak pada sesuatu yang lain bukan pada limpahan kekayaan, tumpukan harta, dan simpanan milyaran rupiah. Sesuatu itu adalah *iman yang benar dan amal shaleh*.<sup>81</sup> Kedua ini yang akan memunculkan kebahagiaan yang hakiki dan

kehidupan yang baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97:

عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, 79-81



*kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>82</sup>

#### **4) Landasan hukum kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian di Indonesia**

Kerjasama bagi hasil pertanian bukan merupakan suatu hal yang tabu atau awam di dengar oleh masyarakat Indonesia, kerjasama tersebut bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan/tradisi bagi masyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi lahan pertanian yang subur dan dapat dimanfaatkan oleh para masyarakat petani. Di Indonesia, masalah perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian sudah diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang terdapat dalam sebuah undang-undang No.2 tahun 1960.

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam pasal 1 undang-undang no.2 tahun 1960 ialah “perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang disebut penggarap berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”<sup>83</sup>

Jangka waktu perjanjian bagi hasil dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 pasal 4 ayat 1 disebutkan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil yaitu perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat

---

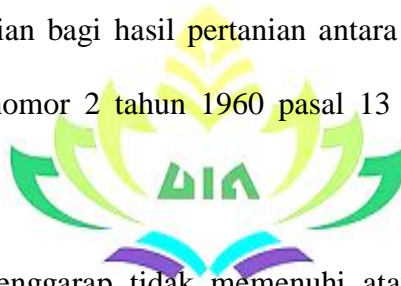
<sup>82</sup> Q.S An-Nahl (16) : 97

<sup>83</sup> Pasal 1 (c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya lima tahun.<sup>84</sup>

Untuk besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil juga diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 pasal 7 ayat 1 tentang perjanjian bagi hasil yang disebutnya bahwa besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah swantara tingkat II ditetapkan oleh bupati/kepala Daerah swantara tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenistanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.<sup>85</sup>

Berakhirnya perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik dan penggarap menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 pasal 13 tentang perjanjian bagi hasil disebutkan:<sup>86</sup>



- a. Jika pemilik dan atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Kampung atas dasar pengaduan salah satu pihak maupun karena jabatannya, berwenang memerintah dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu.

---

<sup>84</sup>Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960

<sup>85</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 7 Ayat 1 tentang Perjanjian Bagi Hasil

<sup>86</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 13 tentang perjanjian Bagi Hasil

- b. Jika pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui perintah kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapatkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

### **3. Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Menurut Adat**

Dalam transaksi tanah objeknya bukanlah tanah, tetapi mempunyai hubungan dengan tanah. Dalam adat dikenal transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil maro atau mertelu (bahasa jawa) adalah apabila pemilik kebun memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan kebunnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapatkan izin harus memberikan sebagian hasil kebunnya kepada pemilik kebun.
2. Sewa adalah suatu transaksi yang mengizinkan orang lain untuk mengerjakan tanahnya atau tinggal ditanahnya dengan membayar dengan perjanjian yang telah dilakukan.
3. Tanggungan adalah apabila seseorang yang hutang kepada orang lain berjanji kepada yang memberi pinjaman, bahwa ia selama belum bisa melunasi hutangnya tidak akan mengadakan transaksi tentang tanahnya, kecuali dengan pemberi hutang.
4. Numpang adalah apabila seseorang pemilik tanah yang mempunyai dan bertempat tinggal di tempat itu memberikan izin kepada orang lain untuk membuat rumah yang kemudian ditempatinya diatas tanah itu juga.

5. Memperduai atau sewa bersama-sama dengan gadai adalah dimana seseorang yang mendapatkan gadaian tanah kemudian memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanah tersebut dengan perjanjian memperduai (*maro*) atau sewa.<sup>87</sup>

Mengenai perbuatan bagi hasil dan perbuatana bagi laba merupakan bentuk kerjasama semacam kongsi diantara pemilik tanah dengan pekerja mengerjakan tanahnya. Setelah tanah dikerjakan, ditanami, dipanen hasilnya, maka diadakan pembagian yang disetujui kedua belah pihak menurut kebiasaan yang berlaku.

Bagi hasil pertanian perkebunan dilatarbelakangi adanya kesulitan petani untuk menggarap lahannya, disisi lain tenaga kerja atau buruh berlimpah. Bagi hasil pertanian perkebunan ini bersifat fleksibel tidak menggunakan perjanjian yang tertulis oleh kedua belah pihak, ada pula yang mekanisme pembagian tidak berimbang. Misalnya *maro* (bahasa jawa) bagian untuk pemilik setengah apabila harga karet di bawah sepuluh ribu dan biaya perawatan ditanggung bersama dan seperenam jika perawatan ditanggung seluruhnya oleh pemilik kebun. Adapun yang cara pembagiannya dengan *maro* (bahasa jawa) yaitu masing-msing dibagi adil, tetapi bibit dan semua keperluan penggarap disediakan oleh pemilik lahan.

Perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan warga secara tidak tertulis dan hanya berbekal kepercayaan saja ketimbang formalitas. Hal ini dilandasi kesepakatan antara para pihak, berkaitan tentang tanggung jawab serta pelaksanaannya saja. Menurut hukum adat setiap perbuatan hukum yang

---

<sup>87</sup>Wignjodipoero, Soerejo, *Pengantar Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 211

mengakibatkan perbuatan posisi hukum dari suatu hal, akan mendapatkan perlindungan hukum apabila perbuatan hukum itu dilakukan secara sah. Untuk menjamin hukum itu sah, harus dilakukan secara terang. Suatu perbuatan hukum dilakukan secara terang jika dilakukan sepengetahuan pimpinan persekutuan. Dalam kenyatannya pimpinan persekutuan hanya dapat menjamin sahnyanya suatu perbuatan hukum itu dilakukan secara terang. Perbuatan hukum yang dilakukan secara terang menjamin perbuatan itu sudah ditempatkan dalam tertib hukum.<sup>88</sup>



---

<sup>88</sup>*Ibid.*, hlm. 231-232

### **BAB III**

#### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran umum Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar**

###### **a. Kondisi Geografis Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar**

Kampung Bima Sakti adalah salah satu kampung yang berada di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Kampung Bima Sakti secara geografis merupakan daerah bukan pantai dan topografinya daerah dataran tinggi dengan luas wilayah 30 km<sup>2</sup> dengan batas-batas Kampung sebagai berikut:

Utara : Kampung Negeri Jaya

Selatan : PTP N 7 Bunga Mayang

Timur : Kampung Kali Awi Indah

Barat : Olok Gading Negeri Besar



Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) sebagai berikut:

Jarak dari pusat pemerintahan : 5 KM

Jarak dari pusat pemerintahan kota : 20 KM

Jarak dari ibu kota kabupaten : 80 KM

Jarak dari ibu kota propinsi : 125 KM

**b. Kondisi Demografi Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar**

- 1) Jumlah penduduk Kampung Bima Sakti terdiri dari 2.557 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 696 KK yang terdiri dari 1.321 laki-laki dan 1.236 perempuan. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel di bawah ini yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1.321	52%
2.	Perempuan	1.236	48%
<b>Jumlah</b>		2.557	100%

Sumber : *Monografi Kampung Bima Sakti* September 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Kampung Bima Sakti berjumlah 2.557 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan tidak jauh berbeda meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

- 2) Jumlah penduduk berdasarkan umur

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kampung Bima Sakti**

No	Golongan umur	Jumlah (jiwa)
1.	0-15 Tahun	367
2.	15-65 Tahun	2,075
3.	>65 Tahun	115

<b>Jumlah</b>	2.557
---------------	-------

Sumber : *Monografi* Kampung Bima Sakti September 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada usia 15 sampai 65 tahun sebanyak 2,075 jiwa atau dari jumlah penduduk Kampung Bima Sakti. Usia 15-65 merupakan usia kerja produktif, artinya masyarakat Kampung Bima Sakti memiliki sumberdaya angkatan kerja yang memadai untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik.

### 3) Mata pencaharian penduduk

Mata pencaharian penduduk Kampung Bima Sakti adalah mayoritas sebagai petani. Namun ada juga yang bekerja sebagai pedagang, pegawai sipil, wiraswasta dan montir.

### 4) Keyakinan penduduk

Sebagian penduduk kampung bima sakti memeluk agama non Islam



### 5) Sarana pendidikan

- a) TK : 2
- b) Sekolah Dasar : 1
- c) TPA : 1

### 6) Sarana peribadatan

- a) Masjid : 1
- b) Musholla : 9
- c) Gereja : 1



## 2. Kondisi Masyarakat Kampung Bima Sakti

Data komposisi penduduk sangat penting untuk pemerintah dalam segala bidang usaha. Jika dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat, maka kesejahteraan dapat diukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa kondisi masyarakat yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat Kampung Bima Sakti.

### f. Kondisi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Indikator umum yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu kelompok masyarakat adalah pendapatan. Pendapatan masyarakat yang makin meningkat berarti juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selain indikator pengeluaran per kapita sebulan, besarnya konsumsi sehari-hari dan tingkat pendapatan yang dimiliki dapat menunjukkan seberapa jauh taraf kesejahteraan yang dicapai. Berikut adalah tabel besaran pendapatan warga kampung bima sakti berdasarkan mata pencaharian.

**Tabel 3.3**  
**Pendapatan Masyarakat Kampung Bima Sakti**

<b>Mata pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Buruh tani	Rp 500.000 – Rp 800.000
Petani	Rp 600.000 – Rp 1. 200.000
Pedagang	Rp 600.000 – Rp 1.200.000
PNS	Rp. 2000.000 – Rp 3.500.000

Honor	Rp. 300.000 – Rp 800.000
-------	--------------------------

Sumber : *Monografi* Kampung Bima Sakti September 2018

a. Kondisi masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran masyarakat

Pengeluaran rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia ini terbagi atas kebutuhan pangan (beras, lauk pauk, garam, gula, kopi, rokok, sabun, minyak tanah) sedangkan untuk kebutuhan non pangan terbagi atas (pendidikan anak, pakaian, kesehatan, menabung, rekreasi, perbaikan rumah, listrik, pembelian barang dan pajak bumi dan bangunan), perhitungan pengeluaran rumah tangga masyarakat petani ini diperoleh dari jumlah kebutuhan pangan dan non pangan.

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat petani bahwa kebutuhan konsumsi setiap hari tidak selalu sama. Penghasilan setiap kali menimbang karet. Jika pendapatan mereka tinggi maka kebutuhan konsumsi akan terpenuhi dengan baik, jika pendapatan sedikit maka pengeluaranpun akan menyesuaikan dengan pendapatan. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga berbeda sesuai kemampuan pendapatan yang di dapat. Umumnya pengeluaran untuk konsumsi berkisar Rp 20.000- Rp 25.000 per hari. Hal ini belum termasuk biaya pendidikan dan lain-lain. Berikut ini merupakan tabel berdasarkan pengeluaran atau pola konsumsi masyarakat.

**Tabel 3.4**  
**Pola Konsumsi Masyarakat**

No	Pola konsumsi	Jumlah pengeluaran (Rp)
1.	Pengeluaran makan / pangan	650.000
2.	Pengeluaran pakaian / sandang	200.000
3.	Pengeluaran biaya pendidikan	500.000
4.	Pengeluaran kesehatan	200.000
5.	Pengeluaran lain (listrik)	75.000

Sumber : Hasil *Wawancara* Dengan Masyarakat Kampung Bima Sakti

b. Kondisi masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan diharapkan akan dapat menambah produktivitas penduduk. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi kualitas pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber dayanya. Tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Bima Sakti terdiri dari warga yang tidak bersekolah, belum sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP, tamat SMA, dan lulusan dari Perguruan Tinggi. Berikut tabel tingkat pendidikan masyarakat Kampung Bima Sakti.

**Tabel 3.5**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk**

<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Tidak tamat SD	87
Tamat SD	1840
Tamat SLTP sederajat	65
Tamat SMA sederajat	61
D-1	1
D-2	5
D-3	8
D-4	-
S-1	15

Sumber: *Monografi* Kampung Bima Sakti

Masyarakat Kampung Bima Sakti jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, bahkan ada juga warga yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi yakni SMA atau Perguruan Tinggi (strata 1). Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan beberapa masyarakat Kampung Bima Sakti yang tinggi, artinya banyak orang tua yang menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dikemudian hari.

c. Kondisi masyarakat menurut kesehatan

Kesehatan memberikan peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kesehatan merupakan satu indikator kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan

masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana kesehatan yang ada di Kampung Bima Sakti adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Prasarana Kesehatan Kampung Bima Sakti**

No	Jenis prasarana	Jumlah
1.	Poliklinik	-
2.	Tempat praktek dokter	1
3.	Puskesmas pembantu	1
4.	Puskesmas	1
5.	Posyandu	3
6.	Apotek	1
7.	Tempat praktek Bidan Kampung	2

Sumber : *Monografi* Kampung Bima Sakti

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana kesehatan di Kampung Bima Sakti memang belum mencukupi, hanya terdapat 1 unit poskesdes dan 3 unit posyandu dan 2 unit tempat praktek bidan yang dapat membantu masyarakat setempat dalam urusan kesehatan.

Dilihat dari tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di Kampung Bima Sakti kurang baik, meskipun sudah terdapat puskesmas, posyandu dan Bidan Kampung. Karena masih banyaknya masyarakat yang sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara maksimal.

d. Kondisi masyarakat berdasarkan tingkat perumahan

Rumah merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau tingkat kesejahteraan suatu keluarga disamping kebutuhan sandang dan pangan. Keadaan atau kondisi tempat tinggal (rumah dapat mencerminkan gambaran keberhasilan pembangunan khususnya dibidang perumahan dan pemukiman). Berikut adalah tabel besaran tingkat perumahan warga.

**Tabel 3.7**  
**Tingkat Perumahan Warga**

Kategori	Status (persen)		
	Hak milik 70%	Sewa 30%	
Status Kepemilikan			
Rumah Berkualitas Baik	Baik 70%	Kurang baik 30%	
Sumber Penerangan (Listrik)	Meteran 70%	Pulsa listrik 30%	
Sarana Air Bersih	Sumur gali 60%	Bendungan 10%	Tidak ada 30%
Rumah tangga mempunyai MCK yang baik	Ada 50%	Tidak ada 50%	

Sumber : *Monografi Kampung Bima Sakti* September

Dari tabel diatas secara keseluruhan warga masyarakat Kampung Bima Sakti telah memiliki hak atas tanah atau tempat tinggal yang dimiliki yaitu berjumlah 70% dan hanya 30% warga yang tinggal ditempat sewa atau kepemilikan sewa. Keadaan rumah yang berkualitas baik sebesar 70% rumah tangga yang mempunyai penerang listrik sudah merata disetiap rumah warga baik yang mempunyai meteran dan pulsa listrik. Selain itu juga, hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak memiliki sarana air bersih yang memadai. Hasil

wawancara dengan beberapa masyarakat bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak memiliki kepemilikan rumah. Selain itu, fasilitas yang ada didalam rumah juga sudah cukup terpenuhi.

### **3. Susunan Pemerintahan Kampung Bima Sakti Kec. Negeri Besar Kabupaten Way Kanan**

Susunan pemerintahan Kampung Bima Sakti Kec. Negeri Besar adalah sebagai berikut:

Kepala Kampung	: Tumardi
Sekretaris Kampung	: Agus Wanto
Bendahara Kampung	: Icha Warni
Kepala Urusan Pemerintah	: Tatik Setiawati
Kepala Urusan Pembangunan	: Iwan susilo
Kepala Urusan Tata Usaha & Umum	: Khairul Sholeh
Kepala Dusun I	: Budi Prastyo
Kepala Dusun II	: Karmuji
Kepala Dusun III	: Sofyan
Kepala Dusun IV	:Sunarto
Kepala Dusun V	: Karmijan



### **4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Bima Sakti**

Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi, hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja, aturan dalam gambaran nyata tentang pembagian tugas dan pekerjaan sehingga terciptalah

kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur sebagai landasan dalam bekerja dimaksudkan agar mereka melaksanakan tugas dengan terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing, juga untuk menanamkan sifat tanggung jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan karena mereka harus berkonsultasi dan berkoordinasi bila terjadi permasalahan di dalam pekerjaan mereka. Dengan adanya pembagian tersebut diharapkan akan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Struktur organisasi terlampir.

#### **5. Gambaran Umum Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil di Kampung Bima Sakti Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan**

Kampung bima sakti merupakan salah satu Kampung yang terdapat di Kecamatan Negeri Besar. Masyarakat Kampung Bima Sakti dalam memenuhi kebutuhannya mayoritas bekerja di sektor pertanian. Profesi sebagai petani tidak semua orang mempunyai perkebunan sendiri yang bisa di kelola, maka dari itu masyarakat Kampung Bima Sakti banyak melakukan kerjasama bagi hasil yang dalam hal ini perkebunan karet. Kerjasama yang diterapkan di Kampung Bima Sakti tidak jauh berbeda dengan tradisi yang diterapkan di kampung-kampung lain yaitu parohan. Parohan merupakan bentuk kerjasama yang terdiri dari dua belah pihak yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak lain sebagai penggarap lahan. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Mereka yang memiliki lahan perkebunan dengan jumlah yang banyak dan mereka tidak mampu untuk mengelolanya, maka dari itu banyak pemilik lahan yang menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk dikelola.



Kerjasama atau syirkah dalam bidang perkebunan ini dilakukan oleh dua orang yakni antara pemilik modal/pemilik lahan dengan penggarap lahan. Menurut bapak Ikhsan, kerjasama dalam bidang perkebunan yang dijalankan di Kampung Bima Sakti ini dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dan sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun akad atau perjanjian kerjasama perkebunan yang dilakukan di kampung bima sakti biasanya dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis dan belum akurat di mata hukum.<sup>89</sup> Untuk batas waktu dalam perkebunan di Kampung Bima Sakti biasanya tidak dapat dipastikan. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya kerjasama perkebunan di Kampung Bima Sakti ini biasanya dikarenakan petani penggarap tidak jujur sehingga tidak ada kecocokan lagi diantara kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama penggarapan perkebunan karet di Kampung Bima Sakti dilakukan secara sederhana. Inisiatifnya bisa datang dari pemilik lahan yang minta kesediaan seseorang untuk menggarap tanahnya, maupun dari petani penggarap yang meminta agar dapat menggarap tanah milik orang lain. Dalam perjanjian kerjasama perkebunan di Kampung Bima Sakti tidak memerlukan saksi untuk syarat sahnya, sehingga perjanjian terjadi dan dianggap sah meskipun tanpa saksi. Dengan demikian unsur kepercayaan menjadi unsur paling utama dalam perjanjian kerjasama penggarapan kebun ini.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Ikhsan selaku pemilik kebun karet, pada 20 Agustus 2018

<sup>90</sup>Wawancara dengan Ferdiansyah dan Bambang selaku pemilik lahan dan petani penggarap, pada tanggal 21 agustus 2018

Menurut bapak Agus Wanto<sup>91</sup>, ada 2 sistem kerjasama perkebunan yang biasa diterapkan oleh para petani di Kampung Bima Sakti seperti:

- g. Pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun karet kepada penggarap. Sistem kerjasama dengan cara ini adalah kerjasama perkebunan dengan sistem bagi hasil yang disepakati oleh pihak petani penggarap dan pemilik kebun baik secara tertulis maupun lisan dengan perjanjian bagi hasil yang dengan hasil dibagi menjadi 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk petani penggarap. Dalam hal pengelolannya, pupuk, obat-obatan, perawatan, peralatan-peralatan yang diperlukan berasal dari pemilik kebun. Pada saat menimbang karet, hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- h. Pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani penggarap untuk dijadikan kebun karet.

Sistem kerjasama perkebunan dengan cara ini adalah bentuk kerjasama dalam bidang perkebunan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis dengan bagi hasil yang disepakati. Adat atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh petani kampung bima sakti adalah bibit, biaya penanaman, biaya penggarapan, pembelian pupuk, perawatan kebun, serta peralatan semua berasal dari penggarap lahan. Namun tidak menutup kemungkinan pemilik kebun terkadang memberikan arahan untuk proses penggarapan hingga menghasilkan. Untuk pembagian hasil dalam kerjasama ini yaitu dengan cara 5 kali panen hasil sepenuhnya menjadi milik

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Agus Wanto, sekretaris Kampung Bima Sakti, pada tanggal 22 agustus 2018

penggarap lahan atau dalam istilah masyarakat setempat 5 kali panen *perai*. Setelah selesai 5 kali panen maka akan dibuat perjanjian baru atau akad baru dengan sistem pembagian hasil sama dengan sistem kerjasama pada lahan yang sudah menjadi kebun yaitu bagi 3 dimana 1 bagian untuk pemilik kebun dan 2 bagian untuk penggarap. Selain dengan menggunakan sistem tersebut, pembagian hasil juga bisa menggunakan sistem *sataran*. Sistem *sataran* biasanya menyesuaikan dengan hasil panen yang didapat.

#### 6. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pemilik Dan Pekerja Di Kampung Bima Sakti

Pada hakikatnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama yang berkembang dalam masyarakat, selama kerjasama tersebut mendatangkan manfaat dan bertujuan untuk saling tolong menolong antara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula praktik kerjasama bagi hasil perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat petani di Kampung Bima Sakti, kerjasama tersebut pada dasarnya adalah sarana untuk tolong menolong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum diuraikan berikut ini adalah data responden penelitian:

**Tabel 3.8**  
**Data Pemilik Kebun dan Petani Pekerja**

No	Nama Responden	Umur	Pekerjaan
1.	Bp. Ikhsan	58 Tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
2.	Bp. Ferdy	28 Tahun	Petani dan Pemilik Lahan
3.	Bp. Wanto	38 Tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan

4.	Bp. Parman	45 Tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
5.	Bp. Riyadi	38 Tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
6.	Bp. Alamsyah	59 Tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
7.	Bp. Heru	30 Tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
8.	Bp. Sutarno	42 Tahun	Petani Pekerja
9.	Bp. Tuwarji	50 Tahun	PNS dan Pemilik Lahan
10.	Bp. Karni	49 Tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
11.	Bp. Hayun	53 Tahun	Wiraswasta dan Pemilik Lahan
12.	Bp. Sugeng	40 Tahun	Petani Pekerja
13.	Bp. Wawan	30 Tahun	Petani Pekerja
14.	Bp. Nanang	32 Tahun	Petani Pekerja
15.	Bp. Arsad	45 Tahun	Petani Pekerja
16.	Bp. Jarot	35 Tahun	Petani Pekerja
17.	Bp. Heri	30 Tahun	Petani Pekerja
18.	Bp. Sutris	26 Tahun	Petani Pekerja
19.	Bp. Wakiman	48 Tahun	Petani Pekerja
20.	Bp. Hari	25 Tahun	Petani Pekerja
21.	Bp. Aan	32 Tahun	Petani Pekerja
22.	Bp. Abed	59 Tahun	Petani Pekerja
23.	Bp. Agus	32 Tahun	Petani Pekerja
24.	Bp. Herman	32 Tahun	Petani Pekerja
25.	Bp. Slamet	62 Tahun	Petani Pekerja
26.	Bp. Supri	57 Tahun	Petani Pekerja
27.	Bp. Suram	58 Tahun	Petani Pekerja

28.	Bp. Sukirno	45 Tahun	Petani Pekerja
29.	Bp. Rahmat	42 Tahun	Petani Pekerja
30.	Bp. Tumijan	48 Tahun	Petani Pekerja

Sumber : Data Olahan 2018

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 30 petani, terdapat 10 petani yang menjadi pemilik lahan dan 20 petani yang menjadi penggarap lahan. Mayoritas dari pemilik lahan selain menjadi pemilik lahan mereka juga berprofesi sebagai wiraswasta seperti membuka warung atau kios dirumahnya yang memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, karyawan, guru, dan juga sebagian mereka mengelola lahan perkebunannya sendiri. Pemilik lahan adalah orang yang memiliki hak penuh atas kebun karet yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Pihak yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dapat memberikan kepercayaan kepada petani penggarap yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai banyak lahan untuk dikelolanya. Sedangkan penggarap lahan adalah orang yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Penggarap lahan biasanya melakukan kerjasama untuk tambahan penghasilan dikarenakan penghasilan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan. Selain menggarap lahan si pemilik, sebagian dari petani penggarap juga mengelola lahan sendiri.

## **7. Hasil Interview Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di Kampung**

### **Bima Sakti Kec. Negeri Besar**

Setiap manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga dengan praktek kerjasama bagi hasil perkebunan karet. Untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya masyarakat melaksanakan kerjasama dengan pemilik kebun karet. Kerjasama atau syirkah dalam bidang perkebunan dilakukan oleh dua orang, yakni antara pemilik kebun dan pekerja.

Dari 30 responden, terdapat 20 orang yang menjadi petani pekerja, berikut tabel tentang kerjasama bagi hasil dari pihak penggarap:

**Tabel 3.9**  
**Data Petani Pekerja**

No	Nama Responden	Jumlah Lahan Garapan	Waktu Lamanya Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil	Bentuk Akad/ Perjanjian
1.	Bp. Sugeng	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
2.	Bp. Wawan	1,5 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
3.	Bp. Heru	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
4.	Bp. Sutris	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
5.	Bp. Wakiman	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
6.	Bp. Hari	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
7.	Bp. Agus	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
8.	Bp. Bambang	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
9.	Bp. Nanang	1,5 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
10.	Bp. Aan	1,5 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
11.	Bp. Abed	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan

12.	Bp. Agus	3 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
13.	Bp. Herman	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
14.	Bp. Slamet	2 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
15.	Bp. Supri	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
16.	Bp. Suram	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
17.	Bp. Sukirno	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
18.	Bp. Rahmat	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
19.	Bp. Tumijan	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan
20.	Bp. Sutarno	1 bidang Kebun Karet	Tidak Ditentukan	Lisan

Sumber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu perjanjian kerjasama bagi hasil perkebunan karet tanpa penentuan batas waktu diawal akad.



Mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama perkebunan karet pada praktiknya di Kampung Bima Sakti seluruhnya perjanjian dilaksanakan tanpa menentukan batas waktunya. Menurut bapak Heru ada sebagian orang yang menerapkan batas waktu untuk kerjasama dalam bidang perkebunan, namun rata-rata tidak ditentukan batas waktunya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat tetap berjalan dengan baik bahkan kerjasama tersebut bisa berlangsung lama.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Heru selaku pemilik lahan, pada tanggal 21 agustus 2018

Menurut bapak Bambang, kerjasama dalam bidang perkebunan yang dijalankan di Kampung Bima Sakti ini dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dan sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun akad atau perjanjian dalam kerjasama yang dilakukan di Kampung Bima Sakti biasanya dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis maupun saksi-saksi dari pihak luar sehingga belum cukup kuat dimata hukum. Untuk batas waktu dalam kerjasama bagi hasil perkebunan karet di Kampung Bima Sakti biasanya tidak bisa dipastikan. Kaena pada awal akad tidak disebutkan batas akhir atau kapan waktu berakhirnya perjanjian kerjasama perkebunan tersebut.<sup>93</sup>

Kerjasama ini pada umumnya yaitu pemilik lahan mencari orang yang dipercaya untuk bekerja dan mengelola kebun karet miliknya, namun terkadang pekerja yang mencari tanah kebun karet untuk diminta dan dikerjakan oleh pekerja. Akan tetapi hal yang terpenting dari kerjasama tersebut yaitu kesepakatan antara keduanya, dimana sang pemilik kebun menyerahkan kebun karetnya kepada pekerja untuk di kelola dan dirawat, kemudian hasil yang diperoleh dari kebun tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>94</sup>

Setelah terjadi kesepakatan antara pemilik kebun dan pekerja, maka pada saat itu juga pekerja kebun karet mempunyai tanggung jawab untuk *mensadap*(mengambil getah karet), merawat, mengelola, dan mengantarkan ke rumah pemilik kebun, lalu oleh pemilik kebun di jual kepada pembeli. Dan

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Bambang selaku pekerja kebun karet, pada tanggal 21 Agustus 2018

<sup>94</sup>Wawancara dengan Wakiman selaku pekerja kebun karet, pada tanggal 22 Agustus 2018



apabila sudah memperoleh hasilnya, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>95</sup>

Untuk jangka waktu pelaksanaan bagi hasil tidak ditentukan berapa lama jangka waktunya. Tapi pemilik kebun karet hanya memberikan amanat kepada pekerja untuk merawat dan mengelola kebun karet miliknya dan kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik kebun dan pekerja perkebunan karet diperoleh satu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama perkebunan karet. Berikut beberapa alasan para petani pekerja untuk melaksanakan kerjasama perkebunan karet, yaitu :

- a. Petani pekerja kebun karet tidak mempunyai lahan untuk ditanami karet, walaupun mereka memiliki keahlian dalam mengelola dan merawat karet, sehingga mereka melaksanakan kerjasama dengan pemilik kebun karet untuk dikelola dan dirawat.
- b. Petani pekerja hanya memiliki lahan sedikit, sehingga mereka melaksanakan kerjasama bagi hasil kebun karet untuk menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, petani pekerja kebun karet memiliki alasan untuk membantu antar sesamanya, khususnya bagi petani yang memiliki lahan kebun karet akan tetapi tidak memiliki

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Sutris selaku pekerja kebun karet, pada tanggal 22 Agustus 2018

<sup>96</sup>Hasil Olahan Data Wawancara dengan pekerja kebun karet, pada tanggal 23 Agustus 2018

waktu dan keahlian untuk merawat dan mengelola kebun karet miliknya, sehingga petani pekerja membantu berdasarkan adat kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan di kampung tersebut.

Selain penytaan dari beberapa petani pekerja, terdapat 10 orang menjadi sampel dari pemilik lahan kebun karet, berikut tabel tentang kerjasama dari pihak pemilik kebun karet:

**Tabel 4.1**  
**Kerjasama Pemilik Lahan**

No	Nama Responden	Luas lahan yang Dimiliki	Bentuk akad/perjanjian
1.	Bp. Ikhsan	2 bidang Kebun Karet	Lisan
2.	Bp. Ferdy	50 bidang Kebun Karet	Lisan
3.	Bp. Wanto	2 bidang Kebun Karet	Lisan
4.	Bp. Parman	3 bidang Kebun Karet	Lisan
5.	Bp. Riyadi	2 bidang Kebun Karet	Lisan
6.	Bp. Alamsyah	3 bidang Kebun Karet	Lisan
7.	Bp. Heru	1 bidang Kebun Karet	Lisan
8.	Bp. Tuwarji	2 bidang Kebun Karet	Lisan
9.	BP. Hayun	2 bidang Kebun Karet	Lisan
10.	Bp. Sutarno	3 bidang Kebun Karet	Lisan

Sumber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 10 responden pemilik kebun. Mayoritas kebun karet yang dimiliki oleh pemilik kebun setiap bidangnya terdiri dari minimal 1000 batang pohon karet. Berdasarkan wawancara diperoleh satu data bahwa dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil pengelolaan kebun karet antara

pemilik dan pekerja kebun karet hanya didasari dengan unsur tolong menolong. Unsur kepercayaan lebih berperan dibanding unsur yang lain, hal ini terlihat dari pemilik kebun yang tidak terlalu memperhatikan keahlian penggarap dalam mengelola dan merawat kebun karet, akan tetapi lebih mementingkan kepercayaan kepada pekerja untuk mengelola kebun miliknya. Bentuk perjanjian kerjasama pekerjaan kebun karet, menurut penelitian yang penulis lakukan, dari beberapa informasi dari pemilik kebun yang diteliti atau diwawancarai, seluruhnya (100%) melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil dilakukan secara lisan tidak ada bukti tertulis apapun, baik itu bukti secara tertulis maupun saksi-saksi dari pihak luar. Untuk batas waktu dalam kerjasama bagi hasil perkebunan karet di Kampung Bima Sakti biasanya tidak dapat dipastikan. Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya kerjasama perkebunan di Kampung Bima Sakti ini biasanya dikarenakan adanya ketidakcocokan antara kedua belah pihak, atau karena salah satu pihak melakukan kebohongan sehingga kerjasama ini harus berakhir.

Menurut bapak Tuwarji selaku pemilik kebun karet menyerahkan karet miliknya kepada petani pekerja. Dalam pengerjaannya, pupuk, biaya perawatan, obat untuk pembekuan karet semua berasal dari pemilik kebun. Dalam kerjasama ini, untuk hal-hal lain seperti pisau untuk memotong pohon karet berasal dari pekerja.<sup>97</sup>

Menurut bapak Sutarno selaku pemilik kebun menjelaskan bahwa kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Kampung Bima Sakti dilakukan secara lisan, dan tidak menyebutkan batas waktunya. Beliau menyerahkan sebidang

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Tuwarji selaku pemilik kebun, pada tanggal 23 Agustus 2018

kebun karetmiliknya kepada petani pekerja, sehingga petani pekerja didayagunakan kemampuan dan tenaganya untuk mengelola. Adapun biaya-biaya selama perawatan ditanggung oleh pemilik kebun.<sup>98</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pemilik lahan diperoleh satu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi hasil perkebunan karet sebagai berikut:

Menurut bapak Tuwarji selaku pemilik kebun karet menjelaskan bahwa alasan melakukan kerjasama paroon kebun karena bapak Tuwarji profesinya sebagi guru di tempat lain sehingga tidak memungkinkan untuk mengeloal lahanya sendiri. Oleh karena itu bapak tuwarji menyerahkan kebun karetnya kepada petani pekerja untuk dikelola.<sup>99</sup>

Bapak Hayun selaku pemilik kebun karet menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama bagi hasil ini yaitu disebabkan bapak Hayun bekerja sebagai wiraswasta sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja di kebunnya sehingga dalam hal ini bapak Hayun sepenuhnya menyerahkan kebunnya kepada pekerja sehingga kebun tersebut ada hasilnya.<sup>100</sup>

Hal senada dikatakan juga oleh bapak Ferdy bahwa alasan melakukan kerjasama bagi hasil kebun karet yaitu tidak memungkinkan untuk mengelolanya

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Sutarno selaku pemilik kebun, pada tanggal 23 Agustus 2018

<sup>99</sup>Wawancara dengan Tuwarji selaku pemilik kebun, pada tanggal 23 Agustus 2018

<sup>100</sup>Wawancara dengan Hayun selaku pemilik kebun, pada tanggal 24 Agustus 2018

sendiri dikarenakan bapak Ferdy bekerja di PTP N 7 sehingga bapak Ferdy juga menyerahkan kebunnya kepada petani pekerja.<sup>101</sup>

Menurut bapak Wanto selaku pemilik kebun karet menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama ini disebabkan karena letak kebun yang ditanami karet jauh dari tempat tinggalnya, sehingga bapak wanto menyerahkan kebun karetnya kepada petani pekerja untuk mengurus, mengelola dan merawat kebunnya.<sup>102</sup>

Menurut bapak Parman, beliau menjelaskan bahwa alasan melaksanakan kerjasama bagi hasil perkebunan karet yaitu disebabkan karena bapak parman memiliki beberapa bidang lahan, sehingga beliau tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya. Oleh karena itu bapak Parman menyerhakna kebun karet miliknya kepada petani pekerja untuk di kelola. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dengan unsur kepercayaan.<sup>103</sup>

Kerjasama antara pemilik kebun dan petani pekerja di Kampung Bima Sakti ada relevansinya dengan sistem pertanian dan perkebunan yang ada di masyarakat. Dimana sistem paroan kebun yang dilakukan oleh masyarakat kampung bima sakti tidakn jauh berbeda dengan sistem kerjasama *musaqoh* yang ada dalam Islam. Perjanjian paroan kebun di kampung bima sakti dpat ditemukan beberapa unsur yaitu adanya para pihak berakad, adanya izin bekerja dari pemilik kebun dan atas dasar kepercayaan.

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Ferdy selaku pemilik kebun, pada Tanggal 20 Agustus 2018

<sup>102</sup>Wawancara dengan Wanto selaku pemilik kebun, pada Tanggal 21 Agustus 2018

<sup>103</sup>Wawancara dengan Parman selaku pemilik kebun, pada Tanggal 24 Agustus 2018

## **8. Sistem Kerjasama Bagi Hasil Pemilik dan Pekerja di Kampung Bima Sakti**

Sistem bagi hasil adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana pengelolaan kebun dilakukan oleh pemilik kebun dan pihak lainnya sebagai pekerja dengan melakukan kesepakatan bagi hasil pertanian atau perkebunan ketika menimbang. Sistem kerjasama bagi hasil dengan cara parohan dalam istilah masyarakat Kampung Bima Sakti adalah satu bentuk kerjasama bagi hasil perkebunan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tulisan, dengan bagi hasil yang disepakati. Untuk bagi hasilnya disesuaikan berdasarkan kesepakatan awal.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden didapatkan data sebagaimana diungkapkan oleh bapak wakiman bahwa “sistem perjanjian kerjasama bidang perkebunan ini biasanya dilakukan dengan cara pemilik kebun memberikan wewenang kepada petani pekerja sebagai pengelola untuk mengelola dan merawat tanaman perkebunan”.<sup>104</sup>

Pembayaran bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Kampung Bima Sakti sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pemilik dan pekerja setelah kebun karet diambil getahnya. Menurut bapak Wanto kerjasama bagi hasil perkebunan karet yang diterapkan di kampung bima sakti dibagi 60-40 artinya 60% untuk pemilik kebun dan 40% petani pekerja karena seluruh biaya di

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan Wakiman selaku petani pekerja kebun karet, pada Tanggal 22 Agustus 2018

tanggung oleh pemilik kebun dan petani pekerja hanya bekerja saja dan tidak mengeluarkan modal. Misalkan pada kerjasama pembagiannya 50-50 artinya pemilik kebun 50% dan petani pekerja 50% namun disini pembelian pupuk dan perawatan dilakukan bersama. Namun kerjasama seperti ini sangat jarang dilakukan karena melihat harga karet yang sering naik turun dan tidak bisa diperkirakan.<sup>105</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden dapat dipahami bahwa bagi hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani pekerja dilakukan dengan kesepakatan pembagian setelah menimbang karet yang biasanya dilakukan dua minggu sekali. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 20 responden untuk dijadikan sampel, beberapa hal yang dijadikan pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar dampak atau manfaat dari adanya kerjasama bagi hasil dalam penelitian ini seperti kualitas kesehatan para pelaku usaha beserta keluarganya, tingkat pendidikan anak-anak pelaku usaha serta tingkat pendapatan sebelum dan sesudah kerjasama bagi hasil perkebunan karet.

#### a. Dilihat dari kualitas kesehatan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sutarno yang bekerja sebagai petani pekerja dan juga memiliki kebun sendiri dan wawancara dengan bapak Jarot bahwa rata-rata petani pekerja sudah terdaftar di puskesmas setempat dan sebagian dari mereka sudah memiliki kartu kesehatan sehingga apabila ada

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Wanto selaku pemilik kebun, pada Tanggal 21 Agustus 2018

anggota keluarga yang sakit mereka bisa membawa ke sarana kesehatan yang ada di Kampung Bima Sakti.

b. Dilihat dari jumlah pendapatan

Pengukuran pendapatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pengukuran pendapatan bagi para pelaku usaha yang sebelumnya mereka bekerja sebagai buruh, untuk lahan seluas 1 bidang kebun atau 1000 batang karet pada waktu sebelum dan sesudah adanya kerjasama bagi hasil perbulannya dengan harga Rp10.000. Berikut adalah data pendapatan para petani yang melakukan kerjasama bagi hasil dari sebelum dan setelahnya pada tahun 2018, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2**

**Pendapatan pemilik kebun Kerjasama Bagi Hasil Di Kampung Bima Sakti**



No	Nama Responden	Pendapatan sebelum kerjasama dalam Rupiah	Pendapatan sesudah kerjasama	Pendapatan setiap bulan
1.	Bp. Ikhsan	Rp. 1.050.000	Rp. 2.100.000	3,5 Kwintal
2.	Bp. Ferdy	Rp. 3.050.000	Rp. 6.200.000	1,5 Ton
3.	Bp. Wanto	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000	3 Kwintal
4.	Bp. Parman	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000	3 Kwintal
5.	Bp. Riyadi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000	3 Kwintal
6.	Bp. Alamsyah	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000	3 Kwintal
7.	Bp. Heru	Rp. 1.050.000	Rp. 1.800.000	3 Kwintal
8.	Bp. Sutarno	Rp. 1.250.000	Rp. 1.800.000	3 Kwintal



9.	Bp. Tuwarji	Rp. 2.230.000	Rp. 3.600.000	6 Kwintal
10.	Bp. Hayun	Rp. 1.150.000	Rp. 1.800.000	3 Kwintal

Sumber : *Wawancara* dengan Masyarakat Kampung Bima Sakti

**Tabel 4.3**


**Pendapatan petani pekerja Kerjasama Bagi Hasil Di Kampung Bima Sakti**

No	Nama Responden	Pendapatan sebelum kerjasama dalam Rupiah	Pendapatan sesudah kerjasama	Pendapatan setiap bulan
1.	Bp. Karni	Rp. 900.000	Rp. 1.600.000	4 Kwintal
2.	Bp. Sugeng	Rp. 750.000	Rp. 1.200.000	3 Kwintal
3.	Bp. Wawan	Rp. 900.000	Rp. 3.200.000	8 Kwintal
4.	Bp. Nanang	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000	3 Kwintal
5.	Bp. Arsad	Rp. 950.000	Rp. 2.000.000	5 Kwintal
6.	Bp. Jarot	Rp. 900.000	Rp. 2.800.000	7 Kwintal
7.	Bp. Heri	Rp. 900.000	Rp. 1.600.000	4 Kwintal
8.	Bp. Sutris	Rp. 950.000	Rp. 1.200.000	3 Kwintal
9.	Bp. Wakiman	Rp. 900.000	Rp. 2.080.000	5,2Kwintal
10.	Bp. Hari	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000	3 Kwintal
11.	Bp. Heri	Rp. 900.000	Rp. 2.080.000	5Kwintal
12.	Bp. Aan	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000	3 Kwintal
13.	Bp. Abed	Rp. 850.000	Rp. 1.200.000	3 Kwintal
14.	Bp. Agus	Rp. 900.000	Rp. 1.200.000	3 Kwintal

15.	Bp. Suram	Rp. 850.000	Rp. 1.200.000	3 Kwintal
16.	Bp. Sukirno	Rp. 850.000	Rp. 1.200.000	3 Kwintal
17.	Bp. Rahmat	Rp. 800.000	Rp. 1.400.000	3,5 Kwintal
18.	Bp. Tumijan	Rp. 500.000	Rp. 1.200.000	3 Kwintal
19.	Bp. Supri	Rp. 800.000	Rp. 1.360.000	3,4 Kwintal
20.	Bp. Herman	Rp. 900.000	Rp. 1.360.000	3,4 Kwintal

Sumber : *Wawancara* dengan Masyarakat Kampung Bima Sakti

Jika kita melihat tabel diatas terlihat bahwa pendapatan petani setiap panen (menimbang getah karet) cukup besar, pendapatan tersebut merupakan pendapatan setiap bulannya. Berdasarkan tabel tersebut juga terlihat bahwa pendapatan petani mengalami peningkatan dari sebelum melaksanakan kerjasama dan sesudah melaksanakan kerjasama. Dari uraian pendapatan responden sebelum dan sesudah melaksanakan kerjasama bagi hasil dapat disimpulkan sebagai berikut:

  
**Tabel 4.4**  
**Pendapatan Rata-Rata Masyarakat**

<b>Cara kerjasama yang dilakukan</b>	<b>Rata-rata pendapatan sebelum</b>	<b>Rata-rata pendapatan sesudah</b>
Kebun	1- 9 Kwintal	1,6 - 1,5 Ton
Tanah Kosong	-	-

Sumber : *Wawancara* dengan Kepala Kampung Bima Sakti

c. Dilihat dari tingkat pendidikan

Pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan diharapkan akan dapat menambah produktivitas penduduk. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi kualitas pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber dayanya.

**Tabel 4.5**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
SD	10 orang	33%
SMP Sederajat	5 orang	17%
SMA Sederajat	12 orang	40%
Perguruan Tinggi (D1, DII, DIII, S1)	3 orang	10%
<b>Jumlah</b>	<b>30 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : *monografi* Kampung Bima Sakti

## **9. Permasalahan yang terjadi Pada Saat Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pemilik dan Pekerja di Kampung Bima Sakti**

Pada praktiknya, kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan masyarakat Kampung Bima Sakti sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, masih terdapat beberapa orang yang dianggap kurang sesuai dengan ajaran Islam dalam hal pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang terjadi di Kampung Bima Sakti yakni diantaranya, dari pihak pekerja yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya, dan biasanya juga disebabkan oleh petani

pekerja yang tidak hanya bekerja di satu tempat saja. Terjadinya tindakan tidak jujur dengan cara petani pekerja membawa hasil karet dan membawanya pulang kerumah, setelah itu pekerja menjualnya sendiri dan tidak memberitahu pemilik kebun, sehingga pemilik kebun merasa dirugikan karena ketidak adanya pengawasan langsung dari pemilik kebun.

#### **10. Manfaat yang Didapatkan dari Kerjasama Bagi Hasil Pemilik dan Pekerja Perkebunan Karet Oleh Masyarakat Kampung Bima Sakti**

Dengan adanya kerjasama dibidang perkebunan tersebut memberikan banyak manfaat bagi para masyarakat petani khususnya para pelaku akad kerjasama bagi hasil. Menurut bapak Ferdy<sup>106</sup>, selaku pemilik kebun, dengan adanya kerjasama bagi hasil perkebunan ini dapat membantu meringankan beban pekerjaan para pemilik lahan, dapat membantu para petani pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dan dapat membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Sedangkan menurut bapak Heru, manfaat adanya kerjasama bagi hasil perkebunan karet tersebut adalah dapat mempererat tali persaudaraan diantara kedua belah pihak, dapat menghapuskan jurang pemisah antara orang yang mampu dan tidak mampu. Dalam hal ini orang yang mampu adalah orang yang memiliki kebun, dan orang yang tidak mampu adalah orang yang bekerja sebagai petani pekerja atau buruh tani, dan dengan adanya kerjasama bagi hasil perkebunan tersebut dapat memperbaiki hubungan yang tadinya urangharmonis diantara kedua belah pihak.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup>Wawancara dengan Ferdy selaku pemilik kebun, pada Tanggal 21 Agustus 2018

<sup>107</sup>Wawancara dengan Hari selaku petani pekerja kebun karet, pada Tanggal 22 Agustus

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pemilik dan Pekerja di Kampung Bima Sakti**

Masyarakat Kampung Bima Sakti melakukan terobosan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari yakni melalui kerjasama bagi hasil di bidang perkebunan. Kerjasama bagi hasil perkebunan merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh para petani, baik itu petani pekerja maupun pemilik lahan. Sebelum terjadinya kerjasama bagi hasil tersebut, mereka melakukan suatu akad atau perjanjian tentang bagaimana sistem kerjasama serta bagaimana sistem bagi hasilnya.

Tujuan dari adanya kerjasama bagi hasil ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau tanah garapan serta untuk meringankan pekerjaan para pemilik kebun. Kerjasama bagi hasil dapat menjadi solusi bagi pemilik kebun dan petani pekerja yang sama-sama membutuhkan dimana pemilik kebun membutuhkan petani pekerja untuk mengelola kebun miliknya sedangkan petani pekerja membutuhkan kebun untuk dapat dikerjakan.

Bercocok tanam baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan merupakan kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus bagi orang yang hendak melakukannya, oleh karenanya tidak semua orang dapat melakukannya. Pihak yang memiliki kebun dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya

dengan suka rela memberikan kepercayaan kepada petani pekerja yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai kebun untuk di kelolanya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem bagi hasil perkebunan pada masyarakat diantaranya:

1. Merupakan pekerjaan yang dapat membantu menambah penghasilan
2. Merupakan pekerjaan turun temurun dari orang-orang terdahulu
3. Kurangnya keterampilan lain yang dimiliki masyarakat untuk bercocok tanam atau bertani lainnya.
4. Kurangnya ekonomi masyarakat Kampung Bima Sakti untuk memiliki lahan perkebunan sendiri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB III dapat dipahami bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil perkebunan karet di Kampung Bima Sakti terdiri dari 2 cara yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun karet kepada petani pekerja dan pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani pekerja untuk dijadikan lahan karet.

1. Pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun karet kepada petani pekerja

Praktek kerjasama bagi hasil di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan pada umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan adat setempat yang berlaku, yakni perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut di Kampung Bima Sakti selama ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan

kesepakatan antara petani pemilik kebun dan petani pekerja. Sehingga untuk sah atau tidaknya tersebut hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kerjasama bagi hasil perkebunan karet pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya. Pada prinsipnya kerjasama bagi hasil di kampung bima sakti yaitu hasil perkebunan dibagi menjadi 2 bagian yakni, sebagian pembagian kerjasama 60% untuk pemilik kebun dan 40% untuk petani pekerja dan semua biaya perawatan, biaya pupuk, biaya obat-obatan ditanggung oleh pemilik kebun, 50% pemilik kebun dan 50% persen petani pekerja jika biaya pupuk, biaya perawatan, biaya obat-obatan dilakukan bersama-sama. Namun pada umumnya masyarakat kampung bima sakti melakukan kerjasama 60%-40%.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa responden yang melaksanakan kerja sama bagi hasil dengan cara menggarap yang sudah menjadi kebun atau dalam istilah masyarakat *ngurus kebun*. Dari 20 petani pekerja semuanya melaksanakan kerjasama tersebut. Dalam hal pelaksanaannya seperti yang dilakukan oleh bapak Ikhsan kerjasama ini pada umumnya yaitu pemilik kebun mencari orang yang dipercaya untuk mengelola dan mengerjakan kebun karet miliknya tau sebaliknya. Akan tetapi hal yang terpenting dari kerjasama tersebut yaitu kesepakatan antara keduanya, dimana sang pemilik tanah menyerahkan kebun karetnya kepada petani pekerja untuk dikelola dan dirawat, kemudian hasil yang diperoleh dari kebun tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

2. Pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepda petani penggarap untuk dijadikan kebiun karet

Pada pembahasan sebelumnya di Bab III telah dijelaskan bahwa kerjasama dalam bidang perkebunan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis dengan bagi hasil yang disepakati. Adat atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh petani di kampung bima sakti bibit, biaya penanaman, biaya penggarapan, obat-obatan, serta peralatan semua berasal dari petani pekerja. Untuk pembagian hasil dalam kerjasama ini yaitu dengan cara 5 kali panen hasil sepenuhnya menjadi milik petani pekerja atau dalam istilah masyarakat setempat yaitu *5 kali panen perai*.

Setelah selesai 5 kali panen maka akan dibuat perjajian baru atau akad baru dengan sistem pembagian hasil sama dengan sistem kerjasama pada lahan yang sudah menjadi kebun yaitu 2 bagian 60% untuk petani pekerja 40% untuk pemilik kebun. Selain dengan menggunakan sistem tersebut, pembagian hasil juga bisa menggunakan sistem *sataran*. Namun di Kampung Bima Sakti masyarakat tidak tertarik menggunakan sistem ini, kebanyakan menggunakan sistem yang awal. Setelah itu akan diadakan musyawarah untuk membuat akad baru atau menghentikan kerjasama.

Berdasarkan pendapat para ulama syafi'iyah merujuk pada rukun-rukun dan syarat-syarat bagi hasil sebagai berikut:



## 1. *Shighat*

*Shighat* yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shighat* dengan *lafazh* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

Dalam prakteknya dilapangan, pada umumnya dilakukan berdasarkan hukum adat setempat yang berlaku yakni perjanjian dilakukan secara lisan atau tidak tertulis atas dasar suka sama suka dan lebih mengutamakan unsur kepercayaan. Dengan cara pihak penggarap datang menemui pemilik kebun dengan pernyataan ingin mengurus kebunnya dengan perjanjian sistem bagi hasilnya menggunakan akad lisan tanpa menggunakan akaad atau perjanjian tertulis. Sedangkan dalam Islam Allah SWT menyebutkan dalam al-Qur'an suarty Al-Baqarah ayat 282:

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam menganjurkan akad kerjasama harus dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

## 2. Dua orang atau pihak yang berakad(*al-‘aqidani*).

Disyariatkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.

Dari penelitian lapangan, pihak yang berakaddi Kampung Bima Sakti yaitu petani pemilik lahan dan petani pekerja. Artinya rukun dan syarat dari pihak yang berakad adalah adanya *aqad* antara pemilik kebun dan petani pekerja yang melakukan praktek kerjasama.

### 3. Kebun dan semua pohon yang berbuah

Semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuahnya satu kali kemudian mati, seperti padi jagung, padi dan yang lainnya. Pada dasarnya musaqoh adalah dikhususkan pada tanaman perkebunan yang pohonnya berakar kuat dan berusia minimal satu tahun. Dengan demikian, jenis tanaman yang akan menjadi objek penelitian haruslah jelas wujudnya. Kebun yang diparokan atau yang menjadi objek kerjasama musaqoh dalam penelitian ini adalah perkebunan karet. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman karet merupakan pohon yang bisa diambil manfaatnya meskipun karet bukan tanaman yang diambil buahnya tetapi karet dapat diambil getahnya dan tanaman karet berusia lebih dari satu tahun. Sehingga kebun yang diparokan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat *musaqoh*.

### 4. Masa Kerja

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28): 28 sebagai berikut:

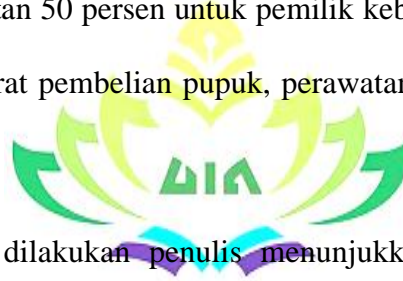
قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ ۝٢٨

Artinya : Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".

Masa kerja dalam hal ini berkaitan dengan jangka waktunya. Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama perkebunan kopi sebagaimana yang diperoleh lapangan bahwa dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bima Sakti terdapat 95,5% yang tidak ditentukan jangka waktunya. Kerjasama dalam perkebunan karet bisa berlangsung lama dan juga bisa berlangsung sangat cepat tergantung kemampuan pekerja.

## 5. Buah

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pelaksanaan kerjasama perkebunan karet atau *musaqoh* dalam hal pembagian hasil panen yaitu sepakat di awal akad dengan pembagian persentase yaitu 60 persen untuk pemilik kebun dan 40 persen untuk petani pekerja. Selain itu ada juga responden yang melakukan kesepakatan 50 persen untuk pemilik kebun dan 50 persen untuk petani pekerja dengan syarat pembelian pupuk, perawatan dan biaya obat-obatan ditanggung bersama.



Dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bima Sakti baik untuk kerjasama pada lahan yang sudah menjadi kebun ataupun lahan kosong merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi untuk bentuk *sighat*, masa kerja dan buah atau pembagian hasil pada kerjasama tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *musaqoh* dalam Islam. Meskipun demikian, pelaksanaan tersebut merupakan adat atau kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun sehingga dari adat atau kebiasaan

tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum mu'amalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad yang termasuk didalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yaitu: perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa *'adah* tidak mungkin berkenaan dengan maksiat; perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang ulang; tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Quran dan Hadits; dan tidak mendatangkan *kemudharatan*. Apabila adat istiadat dapat memenuhi semua kriteria tersebut, maka termasuk *'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum ijtihad.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian kerjasama penggarapan kebun karet (*paroan*) di kampung bima skati adalah *'urf* atau *'adah*. *'urf* adalah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang identik dengan adat kebiasaan. *'urf* secara bahasa yakni sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka.

Para ulama yang mengamalkan '*urf*' dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya '*urf*' yaitu:

1. Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. '*urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
5. '*urf*' itu harus '*urf*' yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Berdasarkan pandangan diatas, maka penulis analisa bahwa tradisi atau kebiasaan kerjasama bagi hasil perkebunan karet dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar dalam pandangan Islam adalah '*urf*' shahih yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Tradisi kerjasama bagi hasil perkebunan karet di Kampung Bima Sakti ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat Kampung Bima Sakti melaksanakan tradisi ini serta tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.

Dalam hal sistem pembagian hasil dengan sataran yang dipaktekkan di Kampung Bima Sakti diterapkan sesuai dnegan penghasilan yang didapatkan. Dalam konsep *musaqoh*, mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagainya, atau bagian petani pekerja, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga makna *al-musaqah* sebagai serikat dalam hasil penen tidak ada lagi. Namun, pelaksanaan pembagian hasil denganh sataran ini dilakukan atas dasar suka sama suka atau rela (*antaradimminkum*) antara kedua belah pihak sehingga makna *musaqah* masih tetap ada.

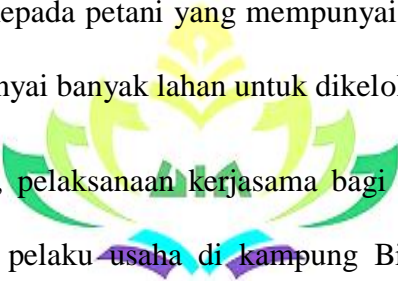
Selain itu dalam penelitian lapangan juga ditemukan penerapan sistem untuk lahan kosong yaitu dengan 5 kali panen sama dengan masyarakat seluruh hasil panen menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu, akan tetapi, masyarakat Kampung Bima Sakti melakukannya atas dasar suka sama suka, dan menurut kebiasaan setempat, sehingga kerjasama tersebut dapat tergolong kerjasama yang sah. Namun, masih perlu diperlukan bimbingan dan sosialisasi tentang kerjasama yang sedang dijalankan.

Apabila terjadi perselisihan pada saat kerjasama berlangsung adalah dengan cara adanya sikap toleransi antara kedua belah pihak. Begitu juga apabila di Kampung Bima Sakti antara pemilik lahan penggarap terjadi perselisihan atau sengketa, biasanya hal tersebut terjadi akibat kesalahpahaman diantara kedua belah pihak maka solusi yang biasa dilakukan adalah dengan cara musyawarah bersama antara kedua belah pihak. Namun, apabila dnegan cara musyawarah tidak terselesaikan maka jalan tengahnya adalah meminta tolong kepada tokoh setempat untuk menengahi atau mendamaikannya. Sedangkan apabila terjadi gagal panen

ataupun hasil yang didapatkan hanya sedikit maka pihak petani pekerja dan pemilik kebun bisa melakukan musyawarah untuk pembagian hasilnya bahkan penggarap dapat melakukan penangguhan pembagian hasil.

## **B. Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bima Sakti**

Luasnya lahan perkebunan di Kampung Bima Sakti menyebabkan masyarakat melaksanakan suatu sistem kerjasama dibidang perkebunan. Kerjasama bagi hasil perkebunan karet di Kampung Bima Sakti dilaksanakan oleh pemilik kebun dan petani pekerja. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk bekerjasama kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pihak yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dengan suka rela memberikan kepercayaan kepada petani yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai banyak lahan untuk dikelolanya.



Bila dilihat dilapangan, pelaksanaan kerjasama bagi hasil perkebunan karet yang dilakukan oleh para pelaku usaha di kampung Bima Sakti memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan rakyat dapat di ukur melalui beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat di mana masyarakat dapat di katakan sejahtera atau tidak sejahtera. Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang telah di paparkan pada landasan teori bab II yang mengukur kesejahteraan karena adanya kerjasama perkebunan karet, maka dari data-data yang di peroleh sebagai berikut:

## 1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Dengan adanya hasil kerjasama bagi hasil perkebunan karet maka dapat membantu masyarakat untuk biaya pendidikan anak-anak para pelaku usaha.

Dengan adanya hasil kerjasama bagi hasil *musaqoh* perkebunan karet maka dapat membantu masyarakat untuk biaya pendidikan anak-anak para pelaku usaha. Dari hasil kerjasama tersebut juga dapat di gunakan untuk pembelian alat atau seragam sekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA atau bahkan Perguruan Tinggi.

## 2. Bidang kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang dan kesehatan.

Dari segi kesehatan hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap belum sepenuhnya bisa dirasakan. Sarana kesehatan yang ada di Kampung Bima Sakti yang belum lengkap seperti belum tersediannya puskesmas atau sarana kesehatan yang belum lengkap, sehingga mengakibatkan masyarakat harus keluar ke kampung lain untuk mendapatkan perawatan yang maksimal.



### 3. Tingkat pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- a. Tinggi ( $> \text{Rp.}5.000.000$ )
- b. Sedang ( $\text{Rp. } 1.000.000 - \text{Rp. } 5.000.000$ )
- c. Rendah ( $< \text{Rp.}1.000.000$ )

Adanya kerjasama bagi hasil *musaqah* perkebunan karet di Kampung Bima Sakti memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha. Lahan perkebunan tersebut diurus dan dirawat kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan diantara keduanya. Dengan adanya kerjasama *musaqah* memberikan pendapatan pada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap ataupun bagi masyarakat yang masih membutuhkan tambahan penghasilan. Hal ini dikarenakan lahan perkebunan yang tersedia dapat dikelola oleh para petani pekerja dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Meskipun terjadi kenaikan pendapatan dengan adanya kerjasama bagi hasil *musaqah*, namun dampaknya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang menjadi pelaku usaha. Pendapatan dari kerjasama bagi hasil perkebunan karet ini tidaklah selalu sama, namun hal tersebut membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tingkat pendapatan masyarakat terutama yang bekerja sebagai petani

penggarap kebun karet mengalami peningkatan. Seperti halnya pendapatan 30 responden yang mengalami peningkatan setiap kali panenya. Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya pendapatan masyarakat terutama yang menjadi pelaku usaha bagi hasil *musaqah* termasuk dalam kategori sedang dan tinggi. Sehingga, dengan adanya kerjasama bagi hasil *musaqah* tersebut memberikan dampak tersendiri bagi kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Komposisi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Penghasilan yang tidak menentu dilihat dari banyak atau sedikitnya penghasilan setiap kali menimbang karet. Jika pendapatan mereka tinggi maka kebutuhan konsumsi akan terpenuhi dengan baik, jika pendapatan sedikit maka pengeluaran pun akan menyesuaikan dengan pendapatan.

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat berupa kerjasama dalam hal lahan perkebunan karet dapat membantu perekonomian masyarakat. Menurut beberapa masyarakat seperti bapak Ikhsan, Wanto dan Tuwarji pengeluaran

sebulan lebih banyak untuk pengeluaran pangan. Sementara sisanya digunakan untuk keperluan lain seperti biaya listrik, biaya pendidikan serta biaya kesehatan. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengeluaran/konsumsi terbesar yang dikeluarkan dari hasil pendapatan lebih besar untuk konsumsi pangan. Sisa pendapatan digunakan untuk pengeluaran lain seperti biaya listrik, pendidikan anak dan kesehatan.

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bima Sakti khususnya para pelaku usaha tidak mempengaruhi komposisi pengeluaran terhadap kebutuhan pokok. Beberapa wawancara terhadap petani pekerja mengatakan pendapatan yang diperoleh dari kerjasama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, maupun terkadang pendapatan yang mereka peroleh belum mencukupi biaya kebutuhan mereka.

#### 5. Tingkat perumahan

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantainya  $10 \text{ m}^2$  dan bagian terluas dari rumah bukan tanah. Status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

Berdasarkan penelitian lapangan, jika dilihat dari indikator perumahan, masyarakat Kampung Bima Sakti belum sepenuhnya dikatakan sejahtera karena beberapa masyarakat belum memiliki hak kepemilikan atas rumah, serta luas

bangunan belum memenuhi kategori sejahtera, namun terlepas dari hal itu, 85% dari masyarakat Kampung Bima Sakti telah memiliki status kepemilikan rumah dan juga didukung oleh fasilitas seperti listrik, MCK, dan air bersih.

Dengan adanya kerjasama bagi hasil *musaqah* yang dijalankan oleh para pelaku usaha di Kampung Bima Sakti menjadikan mereka dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Pendapatan yang diperoleh dari kerjasama tersebut dapat digunakan para pelaku usaha untuk membangun dan memperbaiki kondisi rumah serta untuk membeli fasilitas rumah tangga yang mereka tempati.

Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang sudah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa adanya kerjasama bagi hasil *musaqah* dibidang perkebunan karet berdampak positif bagi masyarakat Kampung Bima Sakti khususnya para pelaku usaha, karena sebagian besar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal itu ditunjukkan dengan adanya beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang telah memenuhi kriteria sejahtera.

Selain indikator kesejahteraan secara umum, juga terdapat indikator kesejahteraan secara Islam. Dimana Islam adalah agama yang menghendaki adanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi para umatnya. Makna sejahtera sejalan dengan misi Islam yakni selamat, aman, damai dan sentosa. Makna kesejahteraan dalam Islam berbeda dengan konsep kesejahteraan secara umum. Dimana kesejahteraan menurut Ekonomi Islam ialah merupakan suatu pencapaian yang tidak hanya dinilai dari hal yang sifatnya material namun juga hal yang bersifat non-material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual.

Menurut Yusuf Qardawi, sesungguhnya manusia jika kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya sudah terpenuhi serta mereka merasa aman terhadap dari dan rezekinya, maka mereka akan hidup dengan penuh ketenangan, beribadah dengan khusyu' kepada Tuhannya yang telah memberi mereka makan, sehingga terbebas dari kelaparan dan memberi keamanan kepada mereka dari rasa takut.

Jika sesungguhnya kesejahteraan dalam perspektif Islam itu dapat tercapai jika setiap orang bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta merasa aman, tentram, dan dapat beribadah dengan khusyu' ditengah-tengah kesibukannya. Islam senantiasa menghendaki adanya keseimbangan dalam hidup setiap manusia, sehingga untuk mencapai kesejahteraan, manusia manusia hendaknya dapat memenuhi kebutuhan yang tiak hanya mataeri saja namun juga kebutuhan spiritual mereka.

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat menurut pandangan Islam berbeda dengan indikator kesejahteraan secara umum. Menurut Islam, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu unsur material dan unsur spiritual.

Masyarakat petani ataupun para petani pekerja di Kampung Bima Sakti melakukan kerjasamabagi hasil perkebunan disela-sela kesibukannya, mereka mampu membagi waktunya untuk dapat beribadah, seperti menjalankan ibadah sholat lima waktu, berpuasa dibulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Selain itu, kerjasama bagi hasil tersebut menjadikan masyarakat petani

khususnya para petani pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Praktik kerjasama bagi hasil *musaqah* perkebunan karet yang dilakukan oleh masyarakat petani Kampung Bima Sakti mempunyai banyak manfaat bagi para petani khususnya bagi para petani pekerja. Adapun manfaat dari kerjasama bagi hasil perkebunan tersebut adalah :

1. Membantu meringankan pekerjaan para pemilik lahan
2. Membantu para petani pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya
3. Membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan
4. Mempererat tali persaudaraan diantara kedua belah pihak
5. Menghapuskan jurang pemisah antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Dalam hal ini orang yang mampu adalah orang yang mempunyai lahan, dan orang yang tidak mampu adalah yang bekerja sebagai petani pekerja
6. Memperbaiki hubungan yang kurang harmonis diantara kedua belah pihak

Dari manfaat yang di dapat dan dirasakan oleh petani khususnya para pekerja, menjadikan para petani menjadi lebih sejahtera hidupnya. Dari adanya kerjasama bagi hasil *musaqah* perkebunan karet ini juga dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini. Berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, menjadikan masyarakat makmur dan sejahtera hidupnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Karet Kampung Bima Sakti Kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan), sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Bima Sakti dengan dua cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun karet kepada petani pekerja untuk dirawat dan diambil getahnya. Akad dilaksanakan dengan lisan dan resiko-resiko yang terjadi di tanggung bersama, Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 60-40 yaitu 60 persen bagian untuk pemilik lahan dan 40 persen bagian untuk petani pekerja, adapun segala biaya yang dibutuhkan di tanggung oleh pemilik lahan. Selain itu, dengan sistem *sataran* yang disesuaikan dengan hasil perkebunan, adapun segala biaya yang dibutuhkan pada saat proses pelaksanaan semua ditanggung oleh petani pekerja.
2. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil dari kerjasama *musaqoh* yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bima Sakti telah memberikan banyak

manfaat bagi kesejahteraan masyarakat antara lain para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan juga bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Namun manfaat dari kerjasama *musaqoh* ini belum sepenuhnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini pemilik kebun dan petani pekerja.

3. Pada praktiknya, kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan masyarakat Kampung Bima Sakti sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, masih terdapat beberapa orang yang dianggap kurang sesuai dengan ajaran Islam dalam hal pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang terjadi di Kampung Bima Sakti yakni diantaranya, dari pihak pekerja yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya, dan biasanya juga disebabkan oleh petani pekerja yang tidak hanya bekerja di satu tempat saja. Terjadinya tindakan tidak jujur dengan cara petani pekerja membawa hasil karet dan membawanya pulang kerumah, setelah itu petani pekerja menjualnya sendiri dan tidak memberitahu pemilik kebun, sehingga pemilik kebun merasa dirugikan karena ketidak adanya pengawasan langsung dari pemilik kebun.

- B. Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, guna melengkapi hasil penelitian, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran dan masukan yang mungkin ada manfaatnya:

1. Diharapkan kepada masyarakat di Kampung Bima Sakti khususnya mereka yang melaksanakan kerjasama bagi hasil *musaqoh* agar dapat memperjelas semua rukun dan syarat yang sesuai dengan Islam.



2. Untuk menghindari adanya perselisihan diantara dua belah pihak, penulis menyarankan mungkin sebaiknya kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian, meskipun hanya dituliskan di selembaran kertas.
3. Untuk menghindari terjadinya ketidakjujuran pihak petani pekerja maka perlu adanya pengawasan dari pihak pemilik kebun, terkait hasil yang didapatkan guna terciptanya keadilan diantara kedua belah pihak.
4. Untuk selalu mengutamakan perspektif Islam di dalam setiap tindakan yang akan dilakukan agar tidak terjadi kecurangan di antara kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Karim Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet, ke-6, 2014
- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, Internasional institute of islam thought), 2002, cet, ke-1
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, PT. Asli Mahasatya, Jakarta, 2006
- Chapra Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989
- Hakim Lukman, *prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta, Erlangga, 2012, cet, ke-15,
- Kaelan, M.S, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filosofi*, Paradigma, Yogyakarta, 2005
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Index Pembangunan Kesehatan Manusia*
- LIPI, *Probelem Komunikasi Antara Aparat Polri Dan Pengunjuk Rasa*, Majalah KOMUNIKA, vol.10 no.2 2007
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, kencana, Jakarta:2012
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosada Karya, Bandung, 2011
- Moleong Lexy j., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2007), cet, ke- 24
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra, Bandung, 2004.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, (Sleman Yogyakarta: Ekonosia), 2004

- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997
- Narbuko Cholid, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), cet, ke-14
- Nasution, Mustofa Edwin DKK, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana, 2007
- Noor Ruslan Abdul Ghafur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Rabbani Pers, Jakarta, 2001
- Salim, Pater, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, English Press, Jakarta, 1991.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Slavina Ktut Mangani, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Sri sukesi adiwimarta dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (jakarta balai pustaka, 1995) cet. Ke-4
- Sub Direktorat Analisis Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan* 2000, Jakarta, Badan Pusat Statistik 2008
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2012
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.
- Syarifudin Amir , *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, jakarta, 2003
- Taslim, Arifin, *Metode Kesejahteraan Masyarakat*, IPB, Bogor, 2004
- Tika Moh Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Tika, Moh. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, PT. Buni Aksara, Jakarta, 2006
- Umi Karomah, Yumidin, *(Sistem Fiskal Tanpa Bunga (Teori Ekonomi Dalam Islam))*(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

<http://repository.usu.ac.id>

<http://qaradaghi.com>



## LAMPIRAN

No	Nama Responden
1.	Bp. Ikhsan
2.	Bp. Ferdy
3.	Bp. Wanto
4.	Bp. Parman
5.	Bp. Riyadi
6.	Bp. Alamsyah
7.	Bp. Heru
8.	Bp. Sutarno
9.	Bp. Tuwarji
10.	Bp. Karni
11.	Bp. Hayun
12.	Bp. Sugeng
13.	Bp. Wawan
14.	Bp. Nanang
15.	Bp. Arsad
16.	Bp. Jarot
17.	Bp. Heri
18.	Bp. Sutris
19.	Bp. Wakiman
20.	Bp. Hari
21.	Bp. Heri
22.	Bp. Aan
23.	Bp. Abed

24.	Bp. Agus
25.	Bp. Suram
26.	Bp. Sukirno
27.	Bp. Rahmat
28.	Bp. Tumijan
29.	Bp. Supri
30.	Bp. Herman



## PANDUAN WAWANCARA

Panduan wawancara untuk petani penggarap

Variabel kerjasama bagi hasil:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menggarap lahan perkebunan karet?
2. Apakah pekerjaan atau aktivitas sebelumnya?
3. Berapa banyak lahan yang bapak/ibu garap setiap tahunnya?
4. Bagaimana sistem kerjasama yang ditawarkan oleh pemilik lahan?
5. bagaimana cara kedua belah pihak dalam menyepakati akad?
6. Menurut kebiasaan masyarakat setempat, berapa lama waktu yang disepakati dalam kerjasama parohan kebun? Apakah ketentuan tersebut disebutkan diawal akad?
7. Dalam menggunakan sistem bagi hasil, apakah ada ketentuan bagi hasil di awalakad? Jika ada ketentuan, yangdisebutkan tersebut berapa persen atau jumlah lain yang biasa dilakukan?
8. Darimanakah biaya/modal untuk mengelola lahan kebun tersebut?
9. Apakah kendala atau masalah yang bapak/ibu alami dalam masa proses penyiapan karet?
10. Apakah penghasilan yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga bapak/ibu?
11. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan dari kerjasama tersebut?
12. Apakah ada yang dirugikan dalam kerjasama perkebunan ini?

13. Bagaimana kerjasama perkebunan (parohan) yang diterapkan saat ini, apakah sesuai dengan adat atau konsep islam?

Panduan Wawancara untuk Pemilik Lahan:

1. Berapa luas kebun karet yang anda miliki?
2. Apakah alasan bapak/ibu sebagai pemilik lahan untuk melakukan kerjasama parohan kebun ini?
3. Bagaimana sistem kerjasama perkebunan yang bapak lakukan?
4. bagaimana kedua belah pihak dalam menyepakati akad?
5. Menurut kebiasaan masyarakat setempat, berapa lama waktu yang disepakati dalam kerjasama parohan kebun? Apakah ketentuan tersebut disebutkan di awal akad?
6. Dalam menggunakan sistem bagi hasil, apakah ada ketentuan bagi hasil di awal akad? Jika ada ketentuan, yang disebutkan tersebut berupa persen atau ada jumlah lain yang biasa dilakukan?
7. Berapa banyak karet yang dihasilkan setiap bulannya?
8. Adakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama panen penggarapan kebun oleh pihak petani penggarap?
9. Apa keuntungan atau manfaat yang bapak/ibu rasakan dari kerjasama perkebunan karet tersebut?
10. Apakah ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama bagi hasil ini?



**Variabel kesejahteraan masyarakat:**

1. Berapakah penghasilan bapak/ibu dalam setiap kali menimbang karet?
2. Berapakah pengeluaran yang bapak/ibu gunakan untuk kebutuhan keluarga setiap bulannya?
3. Apakah masih ada anak yang bersekolah dalam keluarga?
4. Bagaimana jika ada keluarga bapak/ibu yang sakit?
5. Kemanakah bapak/ibu berobat pada saat sakit?
6. Bagaimana status kepemilikan rumah bapak/ibu serta apakah rumah bapak/ibu memiliki fasilitas seperti listrik, MCK, dan sumber air bersih?

**Panduan wawancara kepada Kepala Desa:**

1. Berapakah jumlah penduduk Kampung Bima Sakti?
2. Berapakah jumlah pelaku usaha kerjasama perkebunan yang ada di Kampung Bima Sakti?
3. Bagaimanakah mekanisme kerjasama perkebunan yang biasa diterapkan di Kampung Bima Sakti?
4. Bagaimanakah sistem pembagian bagi hasil yang biasa diterapkan di Kampung Bima Sakti?



Dokumentasi di saat menimbang dan mencatat hasil kebun











Iluk	30	86 + 95
Sam	34	50
Abus	26	37
Dobla	33	100 + 65
Juman	88 + 92	
Ea	61	
Endol	78	
Beer	30	



Dokumentasi di saat petani pekerja berada di kebun dan melaksanakan tugasnya





Dokumentasi di saat proses penimbangan dan penerimaan hasil kerjasama

